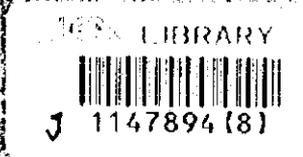


No. _____

*Studi Kasus
pada
Proyek Pembangunan Pertanian Dan Pedesaan Terpadu
di
Propinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia*

Maret 1997

Japan International Cooperation Agency (JICA)



ADT
UR
97.54

Studi Kasus pada Proyek Pembangunan Pertanian Dan Pedesaan Terpadu di Propinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia

Maret 1997

108
807
ADT

97.54



1147894 [8]

Studi Kasus
pada
Proyek Pembangunan Pertanian Dan Pedesaan Terpadu
di
Propinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia

Maret 1997

Japan International Cooperation Agency (JICA)

PRAKATA

Japan International Cooperation Agency (JICA) telah menyelesaikan "Integrated Agricultural and Rural Development Project in Southeast Sulawesi Province = Proyek Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Terpadu di Propinsi Sulawesi Tenggara" (Proyek) di Indonesia sebagai kerjasama teknik tipe proyek sejak 1 Maret 1991 sampai 28 Februari 1998 selama 6 tahun termasuk 1 tahun perpanjangan dan tindak lanjut kerjasama yang sejak 28 Februari 1998 dilaksanakan.

Tujuan proyek adalah untuk memberikan kontribusi dalam memperbaiki standar hidup dan meningkatkan pendapatan para petani, meningkatkan produktivitas pertanian dan penganeekaragaman tanaman dengan jalan alih teknologi dan pengetahuan pada pembangunan pertanian dan pedesaan yang dapat diterima oleh kondisi alam dan kondisi sosial di daerah pedesaan ditempat yang pembangunannya tertinggal dibelakang.

Ciri khas karakteristik proyek adalah penegasan keperan-sertaan dan perbaikan seluruh ekonomi pedesaan melalui penaksiran banyak sisi untuk memelopori pembangunan pedesaan seperti misalnya perbaikan diversifikasi tanaman dengan teknologi produksi, dengan pelayanan penyuluhan di lapangan dan mengaktifkan organisasi petani termasuk didalamnya para wanita dan para pemuda. Sebagai tambahan, pembangunan pertanian dan pembangunan prasarana pedesaan juga prasarana jaringan irigasi dengan skala kecil pada penanaman padi, adalah memajukan inti proyek.

Pada studi contoh telah dikumpulkan catatan-catatan pada waktu perencanaan, pelaksanaan dan monitoring proyek, dan menyusun daftar pelajaran dan menyusun saran untuk mendapatkan, dengan mem-verifikasi aktivitasnya dengan maksud dapat dipakai sebagai acuan untuk kerjasama teknik tipe proyek. Kami mengharapkan laporan ini berguna bagi banyak orang dilapangan tempat kerjasama pembangunan pertanian dan pedesaan.

Studi contoh telah diselesaikan oleh Japan Agricultural Land Development Agency dan kami ingin menyampaikan penghargaan kami kepada para tim tenaga ahli proyek yang dipimpin oleh Mr. Nobuyoshi Kayano.

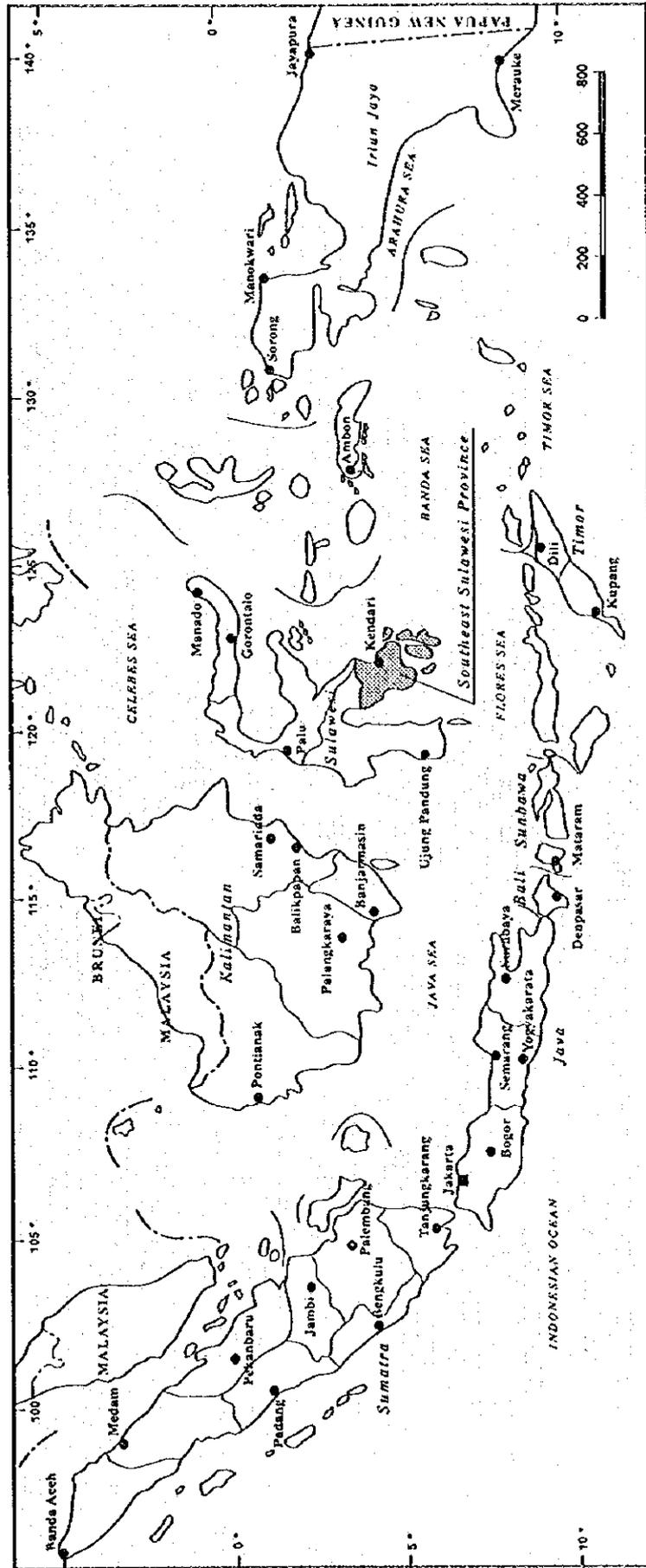
Disamping itu, isi laporan ini seperti yang diterangkan diambil dengan cara memberikan contoh pada pembangunan pertanian dan pedesaan dengan cara memajukan intinya yaitu perbaikan prasarana produksi termasuk didalamnya jaringan irigasi skala kecil, dan dapat dicatat bahwa laporan ini tidak akan mewakili pendapat JICA dilapangan pada kerjasama pembangunan pertanian dan pedesaan.

Maret 1997

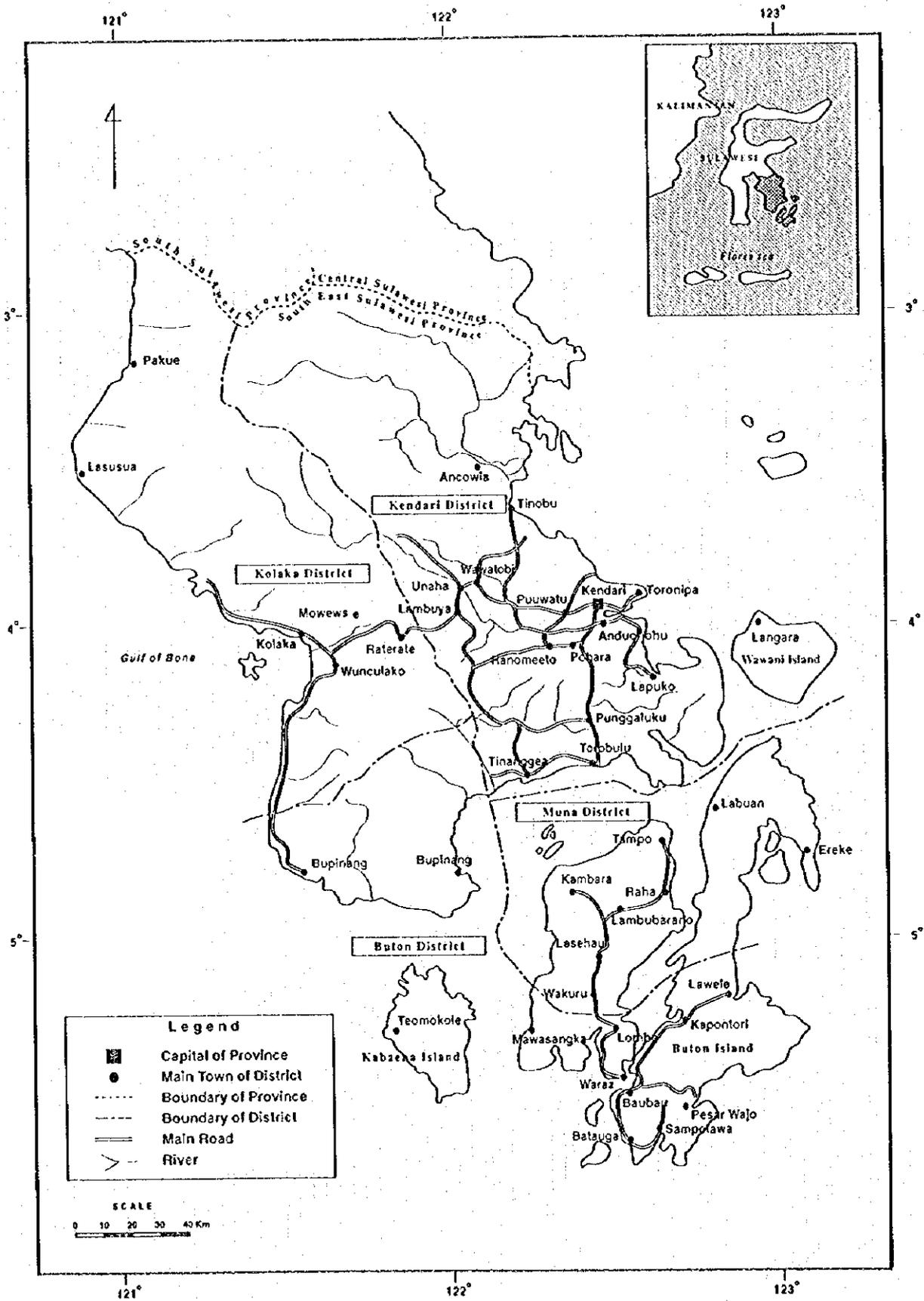
Ohta Shinsuke

Direktur kerjasama Pembangunan Pertanian.

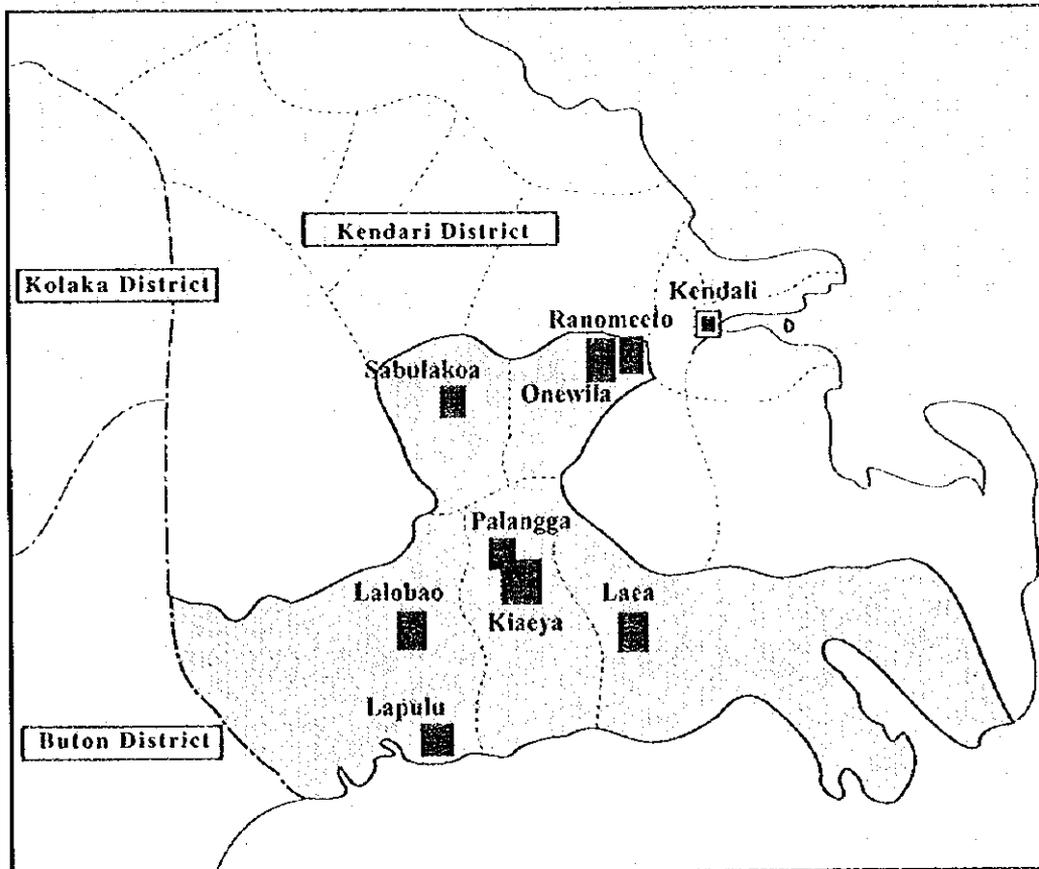
JICA



Peta Negara Indonesia



Peta Provinsi Sulawesi Tenggara



Project Site : 5 districts in West North of Kendari

Project Office : Kendari City

- 1. Kendari → Ranomeeto/Onewila = 15km - 20 km (30 minutes)**
- 2. Kendari → Sabulakoa = 30 km (1hour)**
- 3. Kendari → Laca = 50 km (1.5 hours)**
- 4. Kendari → Palangga/Kiaeya = 70 km (2.5 hours)**
- 5. Kendari → Lobaoo/Lapulu = 85 km (3 hours)**

Peta wilayah Proyek

Singkatan

Singkatan	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris
1. ABRI	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia	Indonesian Armed Forces
2. AD	Angkatan Darat	Army Ground Forces
3. AL	Angkatan Laut	Navy
4. AU	Angkatan Udara	Air Forces
5. BALITIRO	Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat	Research Institute for Spice and Medicinal Crops
6. BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Regional Development Planning Agency
7. BAPPENAS	Baadan Perencanaan Pembangunan Nasional	National Development Planning Board
8. BBD	Bank Bumi Daya	Bumi Daya Bank (Government Bank)
9. BDN	Bank Dagang Negara	Dagang Negara Bank (Government Bank)
10. BI	Bank Indonesia	Bank of Indonesia
11. BIMAS	Bimbingan Massal	Mass Guidance
12. BIP	Balai Informasi Pertanian	Agricultural Information Center
13. BNI	Bank Negara Indonesia	BNI Bank (Government Bank)
14. BPD	Bank Pembangunan Daerah	Pembangunan Daerah Bank (Regional Government Bank)
15. BPP	Balai Penyuluhan Pertanian	Agricultural Information Center
16. BPPT	Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi	Assessment and Application of Technology Agency
17. BRI	Bank Rakyat Indonesia	Rakyat Indonesian Bank (Government Bank)
18. DEPAG	Departemen Agama	Ministry of Religious Affairs
19. DWPDAG	Departemen Perdagangan	Ministry of Trade
20. DEPDAGRI	Departemen Dalam Negeri	Ministry of Internal Affairs
21. DEPDIKBUD	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	Ministry of Culture and Education
22. DEPHANKAM	Departemen Pertahanan dan Keamanan	Ministry of Defense and Security
23. DEPHUB	Departemen Perhubungan	Ministry of Communication
24. DEPHUT	Departemen Kehutanan	Ministry of Forestry
25. DEPKEH	Departemen Kehakiman	Ministry of Justice
26. DEPKES	Departemen Kesehatan	Ministry of Health
27. DEPKEU	Departemen Keuangan	Ministry of Finance
28. DEPKOP	Departemen Koperasi	Ministry of Cooperatives
29. DEPLU	Departemen Luar Negeri	Ministry of Foreign Affairs
30. DEPNAKER	Departemen Tenaga Kerja	Ministry of Labor
31. DEPPARPOSTEL	Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi	Ministry of Tourism, Post and Telecommunication
32. DEPPEN	Departemen Penerangan	Ministry of Information
33. DEPPERIN	Departemen Perindustrian	Ministry of Trade
34. DEPSOS	Departemen Sosial	Ministry of Socials Affairs
35. DEPTAN	Departemen Pertanian	Ministry of Agriculture
36. DEPTRANS	Departemen Transmigrasi	Ministry of Transmigration
37. DIRJEN	Direktorat Jenderal	General Directorate
38. DPRD TK. I	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I	Head of Province Level
39. GBHN	Garis-garis Besar Halwan Negara	The General Principles of National Development
40. GERSAMATA	Gerakan Desa Makmur Merata	The Equitable Prosperous Rural Movement
41. HANSIP	Pertahanan Sipil	Civil Defence

Singkatan

Singkatan	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris
42. IDF	Inpres Desa Tertinggi	Presidential Directive for Backward Village
43. KABID	Kepala Bidang	Head of Division
44. KAKANWIL	Kepala Kantor Wilayah	Head of Regional Office
45. KANWIL	Kantor Wilayah	Regional Office
46. KASI	Kepala Seksi	Head of Section
47. KB	Keluarga Barendana	Family Planning
48. KDHI	Kepala Daerah	Head of Province
49. KDHI TK. I	Kepala Daerah Tingkat I	Head of Province Level I (Governor)
50. KDHI TK. II	Kepala Daerah Tingkat II	Head of Regency (Regent)
51. KPK	Kepala Pertanian Kecamatan	Head of District Agriculture (Kecamatan)
52. KUD	Koperasi Unit Desa	Rural Unit Cooperatives
53. LBH	Lembaga Bantuan Hukum	Legal and Society
54. LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	The Indonesian Academy of Sciences
55. LKMD	Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa	Village Social Activities Group
56. LMD	Lembaga Musyawarah Desa	Village Discussion System
57. MENTAN	Menteri Pertanian	Minister of Agriculture
58. P3A	Perhimpunan Petani Pemakai Air	Water Users Association
59. P3K	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan	First Aid
60. PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa	United Nations
61. PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum	Municipal Waterworks
62. PELITA	Pembangunan Lima Tahun	Five Year Plan
63. PEMILU	Pemilihan Umum	General Election
64. PERTANINA	Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Ne	Indonesian State Owned and Company
65. PELUMTEL	Perusahaan Umum dan Telekomunikasi	National Telephone & Telegraph Corporation
66. PKK	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	The Family Welfare Organization
67. PLN	Perusahaan Listrik Negara	State Electricity Enterprise
68. PMI	Palang Merah Indonesia	Indonesian Red Cross
69. POLRI	Polisi Republik Lapangan	Indonesian Police
70. PPL	Penyuluh Pertanian Lapangan	Extension Workers
71. PPN	Pajak Pendapatan Negara	National Income Tax
72. PPS	Penyuluh Pertanian Sepesial	Senior Extension Workers
73. PPUP	Penyuluh Pertanian Sepesial	Agricultural Extension Workers
74. PU	Pekerjaan Umum	Public Works
75. SEKAB	Sekretariat Kabinet	Cabinet Secretariate
76. SEKAP	Sekretariat kabinet Pembangunan	Development Cabinet Secretary
77. SEKDALOPBANG	Sekretariat Pengendalian Operasi Pembangunan	Supra Cabinet Level Coordinator of Development Operations
78. SEKJEN	Sekretariat Jenderal	Cabinet Secretariate
79. SEKWILDA	Sekretaris Wilayah Daerah	Regional Secretary
80. TNI	Tentara Nasional Indonesia	Indonesian National Armed Forces
81. UNIAIU	Universitas Haluoleo	Haluoleo University

Tingkat konversi mata uang dan tabel standar gaji buruh

Year	Month	¥/US\$	Rp/US\$	¥/IRp	Rp/¥	Year	Month	¥/US\$	Rp/US\$	¥/IRp	Rp/¥
1991	6	140	1939	0.072	14	1995	5	105	2153	0.048	21
	7	140	1948	0.072	14		6	107	2158.5	0.048	20
	8	140	1951	0.072	14		7	104	2163.5	0.046	21
	9	140	1957	0.072	14		8	101	2158.5	0.047	22
	10	135	1964.5	0.069	14		9	102	2185.75	0.046	21
	11	135	1973.5	0.068	15		10	100	2169.88	0.046	22
	12	133	1981.5	0.067	15		11	100	2165.5	0.046	22
	1	130	1986	0.065	15		12	101	2172	0.046	22
	2	130	2000.5	0.065	15		1	102	2185.5	0.047	21
	3	130	2006.5	0.065	15		2	101	2208.5	0.048	22
	4	135	2013	0.067	15		3	100	2208.5	0.045	22
	5	136	2018.5	0.067	15		4	92	2226.5	0.042	24
6	133	2024.5	0.066	15	5	85	2223.5	0.038	26		
7	128	2029.5	0.064	16	6	87	2219.5	0.039	26		
8	128	2030.5	0.063	16	7	87	2223.5	0.039	26		
9	128	2030.5	0.063	16	8	90	2226.5	0.04	25		
10	125	2032.5	0.062	16	9	100	2259.5	0.044	23		
11	125	2044.5	0.061	16	10	102	2260.5	0.045	22		
12	127	2053	0.062	16	11	102	2260.5	0.045	22		
1993	1	127	2056.5	0.062	16	12	103	2275.25	0.046	22	
	2	128	2059.5	0.062	17	1	103	2280.5	0.046	22	
	3	123	2061.5	0.06	17	2	107	2284.5	0.046	22	
	4	119	2065.5	0.058	17	3	107	2311.5	0.046	22	
	5	114	2068.5	0.055	18	4	107	2328.5	0.046	22	
	6	112	2073.5	0.054	18	5	109	2325	0.047	21	
	7	109	2082.5	0.052	19	6	108	2324.5	0.046	22	
	8	109	2090.5	0.052	19	7	110	2317	0.047	21	
	9	107	2096.5	0.051	20	8	110	2342	0.046	22	
	10	108	2105.5	0.051	20	9	109	2333.75	0.047	21	
	11	111	2099.5	0.053	19	10	111	2314.75	0.048	21	
	12	111	2100.5	0.053	19	11	114	2321.25	0.049	20	
1994	1	114	2104.5	0.054	19	12	113	2335.5	0.048	21	
	2	114	2109	0.054	19	1	116	2358.75	0.05	20	
	3	108	2138.5	0.05	20	2	122	2367.5	0.052	19	
	4	107	2146.5	0.048	20	3	124	2388.7	0.051	20	

**Studi Kasus Pada Proyek Pembangunan Pertanian Dan Pedesaan Terpadu Di Propinsi
Sulawesi Tenggara, Indonesia**

Daftar Isi

Prakata

Peta Umum Indonesia

Peta Propinsi Sulawesi Tenggara

Peta Lokasi Proyek di Kabupaten Kendari

Singkatan

Tingkat konversi mata uang dan tabel standar gaji buruh

I. Pembangunan Pertanian dan Pedesaan

1. Konsep pembangunan pertanian dan pedesaan	I - 1
1.1. Tujuan pembangunan pertanian dan pedesaan	I - 1
1.2. Pembangunan Pedesaan dan peranan-sertaan	I - 3
2. Pendekatan dalam kerjasama	I - 6
2.1. Pendekatan dalam pembangunan pedesaan	I - 6
2.2. Tugas bagi administrasi pembangunan pedesaan	I - 7
2.3. Peran-serta dan perencanaan dari bawah	I - 8
2.4. Pembentukan badan di tingkat desa	I - 9
2.5. Metode perencanaan pembangunan dan pedesaan	I - 11
2.6. Metoda alih teknik konstruksi	I - 24
2.7. Metoda pembentukan organisasi	I - 27
2.8. Peninjauan kembali kebiasaan bertani tradisional dan penciptaan cara teknis baru dari peninjauan itu ...	I - 39
3. Tugas pelaksanaan proyek pembangunan pertanian dan pedesaan	I - 41

II. Isi Perencanaan Proyek

1. Sejarah dan Latar Belakang Proyek	II - 1
1.1. Karakteristik Desa di Indonesia	II - 1
1.2. Survey dasar kedalam pembangunan desa seberang oleh JALDA	II - 10
1.3. Survey perumusan proyek	II - 13
1.4. Permintaan kerjasama teknik untuk tipe proyek	II - 16
1.5. Survey jangka panjang	II - 16
1.6. Pelaksanaan Diskusi Survey	II - 18
1.7. Karakteristik Proyek	II - 23
2. Kerangka dan kegiatan proyek	II - 29
2.1. Rancangan investasi dan hasil-hasilnya	II - 29
2.2. Metoda Pelaksanaan Konstruksi	II - 38
3. Sistem kerjasama bilateral (organisasi administrasi)	II - 41
3.1. Departemen Pertanian R.I. dan pemerintah daerah Sulawesi Tenggara	II - 41

III. Kegiatan dan Hasil Proyek

1. Recana, kegiatan dan hasil proyek menurut bidangnya.....	III - 1
1.1. Pembangunan pertanian dan pedesaan terpadu.....	III - 1
1.2. Rencana pembangunan prasarana.....	III - 8
1.3. Rencana bercocok tanam.....	III - 22
1.4. Rencana pemberian bimbingan teknik bertani.....	III - 31
1.5. Pemeliharaan alat dan fasilitas.....	III - 36
1.6. Peran-serta petani dalam proyek.....	III - 39
1.7. Rencana-rencana lain (peningkatan pelatihan organisasi petani).....	III - 42
2. Monitoring.....	III - 47
2.1. Status Pelaksanaan Proyek.....	III - 47
2.1.1. Perbandingan perencanaan proyek dan hasilnya.....	III - 47
2.1.2. Survei pokok (Penaksiran ekonomi).....	III - 50
2.2. Partisipasi wanita desa dan pertimbangan WID (Woman in Development).....	III - 58
2.2.1. Struktur kehidupan di wilayah pelaksanaan proyek.....	III - 58
2.2.2. Pendekatan partisipatif dan metode pengembangan pedesaan terpadu.....	III - 59
2.2.3. Siklus proyek dan keikutsertaan wanita.....	III - 61
2.2.4. Permasalahan-permasalahan dari sudut pandang WID/GAD.....	III - 63
2.2.5. Garis besar organisasi wanita dari desa-desa yang berpartisipasi.....	III - 64
2.2.6. Ringkasan dan Saran.....	III - 77
2.3. Perubahan di masyarakat pedesaan.....	III - 80
2.3.1. Sifat masyarakat pedesaan di daerah proyek.....	III - 80
2.4. Hasil survei dan misi evaluasi.....	III - 89
3. Dampak proyek.....	III - 94
3.1. Perkiraan dampak ekonomi selama perencanaan.....	III - 94
3.1.1. Jam-kerja per tugas bertanam padi per satuan luas.....	III - 94
3.1.2. Kriteria Evaluasi.....	III - 95
3.1.3. Evaluasi besarnya pendapatan (Evaluasi peningkatan produksi tanaman).....	III - 96
3.2. Pembangunan Ekonomi Indonesia selama pelaksanaan proyek.....	III - 96
3.2.1. Pembangunan Ekonomi Indonesia.....	III - 96
3.2.2. Pengembangan Ekonomi di daerah proyek.....	III - 97
3.3. Rencana proyek dan hasilnya.....	III - 97
3.4. Metoda pelaksanaan proyek.....	III - 97
3.5. Perubahan produksi pertanian dan pendapatan pertanian di daerah proyek.....	III - 98
3.6. Dampak Ekonomi.....	III - 99
4. Pandangan dan rekomendasi tenaga ahli dan counterpart berkenaan dengan pengalaman di proyek.....	III - 101
4.1. Pandangan tenaga ahli.....	III - 101
4.2. Kesan, saran dan pandangan counterpart.....	III - 109

IV. Rekomendasi untuk Pembangunan Partisipatif Pertanian dan Pedesaan

1. Metoda-metoda Partisipasi dan Arti pentingnya.....	IV - 1
1.1. Pembangunan partisipatif (Pengikutsertaan).....	IV - 1
1.2. Pembangunan organisasi dan sistem.....	IV - 2
1.3. Metoda-metoda pembangunan partisipatif.....	IV - 2

2. Partisipasi petani dalam keadaan senyatanya	IV - 8
2.1. Catatan partisipasi dalam pembangunan pertanian dan pedesaan.....	IV - 8
2.2. Pembangunan organisasi	IV - 10
2.2.1. Kelompok Tani	IV - 11
2.2.2. Kelompok Wanita Tani /KWT, Kelompok Tenaga Tani /KTT	IV - 11
2.2.3. Perkumpulan Petani Pemakai Air : P3A (Water Users' Association).....	IV - 12
2.3. Bimbingan dan Penyuluhan.....	IV - 12
2.4. Pandangan ahli mengenai keadaan partisipasi petani (intisari dari laporan pendapat ahli).....	IV - 13
3. Cita-cita pembangunan partisipatif di kemudian hari	IV - 15
3.1. Konsep kunci dikemudian hari pembangunan pertanian dan pedesaan.....	IV - 15
3.2. Konfirmasi komitmen pemerintah dan evaluasi keterandalan.....	IV - 19
3.3. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam survey pencarian fakta	IV - 19
3.3.1. Pemahaman masalah dan kebutuhan secara tepat.....	IV - 19
3.3.2. Kebutuhan pembangunan partisipatif.....	IV - 20
3.3.3. Survey sosial dan pertimbangan sosial dan merancang rencana.....	IV - 21
3.4. Saran-saran untuk memperkuat dan membangun organisasi wanita pedesaan.....	IV - 26
3.5. Pengarahan perencanaan pembangunan berdasarkan hasil pendekatan partisipatif (inti sari dari rekaman Komisi Pendukung poyek ke-2 1996).....	IV - 28
3.6. Saran-saran dari team evaluasi akhir.....	IV - 30

I. Pembangunan Pertanian dan Pedesaan

1. Konsep pembangunan pertanian dan pedesaan

1.1. Tujuan pembangunan pertanian dan pedesaan

Lingkup dan subyek pembangunan pertanian dan pedesaan agak bervariasi diantara beberapa negara, dengan definisi yang sangat sempit, dapat diartikan dengan peningkatan hasil produksi pertanian, khususnya makanan pokok dan produksi untuk ekspor. Dalam lingkup ini pembangunan pedesaan mempunyai tujuan meningkatkan dan memperluas fasilitas distribusi dan sistem, dan memajukan kerjasama dibidang yang ada hubungannya dengan pertanian. Kini sasaran tambahan telah diperluas kemodal sosial dasar yaitu konservasi sumber, perlindungan lingkungan dan penciptaan sikap yang ramah untuk dibawa ke perbaikan yang lebih luas pada produksi pertanian, lingkungan pedesaan dan cara hidup orang-orang desa.

Namun demikian, proyek bantuan teknik pada masa lalu harus dikonsentrasikan kepada pemberian latihan kepada instruktur teknik di lembaga pemerintahan dan akan ada waktu luang sebelum manfaat bantuan yang sedikit ini diturunkan sampai ke tingkat petani sebagai pengguna akhir. Pentingnya masalah ini telah disoroti untuk dijadikan proyek kerjasama keperan-sertaan yang dapat membawa petani ketengah proyek.

Proyek semacam ini prasyarat pertama adalah penduduk calon desa harus mempunyai minat besar dalam memajukan desanya dan meningkatkan kehidupannya dan melaksanakan peningkatan cara mereka bertani. Mereka harus siap dan mau bekerja bersama sebagai kelompok, mereka harus memiliki mutu kepemimpinan dan harus berpotensi kuat untuk berorganisasi segera.

Pembangunan pertanian dan pedesaan terpadu dengan pendekatan keperan- setaan dilaksanakan dengan kerjasama yang antusias dengan mengikut-sertakan penduduk setempat untuk meningkatkan dan membuka pertaniannya kedalam lingkungan kehidupannya, yang menjadi pusat kehidupannya dan hasil pertaniannya. Sasarannya adalah untuk mencapai keharmonisan dalam pembangunan yang mantab didesa.

Desa dibangun oleh rakyat, petani dan oleh para pekerja penduduknya. Petani satu-satunya yang membuka tanah petak perpetak secara keseluruhan, yang menjadi dasar bergerak nya organisasi dalam membangun desa.

Pembangunan pedesaan dengan peran-serta secara penuh penduduknya dengan tujuan membawa peningkatan empat aspek utama.

(1) Produktivitas

Perbaikan yang stabil pada produktivitas tanah pertanian dan tenaga kerjanya, yang diperlukan untuk intensifikasi dan beraneka ragam tata guna lahan, membutuhkan pembangunan prasarana pedesaan seperti irigasi, drainasi dan jalan pertanian. Perbaikan ini merupakan prasyarat yang perlu untuk memperbesar produktivitas. Pengenalan teknik pasca panen yang maju dan pengenalan perusahaan kecil di desa-desa harus diperhitungkan. Hal ini akan membawa kepada produktivitas yang lebih besar dalam pertanian, dalam kaitannya dengan industri, yang akan mengubah kepada peningkatan pasokan barang-barang pabrik, fasilitas dan peralatan serta peningkatan pendapatan petani, sebagaimana nilai tambah pada produksi pertanian. Singkatnya fasilitas dan metoda diperlukan untuk menaikkan jumlah produktivitas, termasuk pendapatan non-pertanian di pertanian desa.

(2) Keadilan

Peningkatan prasarana dan pengelolaan pertanian didesa seharusnya didasarkan kepada pembagian yang adil dari hasil peningkatan produksi dan keuntungannya serta menurunnya perbedaan pendapatan. Proyek semacam ini harus difikirkan untuk memastikan agar rakyat dapat menerima manfaat yang sama tanpa melihat kaya atau miskin. Perhatian juga harus diberikan kepada penciptaan kesempatan kerja sebagai cara menekan kemiskinan bagi yang tidak memiliki tanah dan petani kecil dengan cara menyerap mereka kedalam industri lain. Kuncinya adalah mengarahkan kepada perluasan kesamaan hak pada kesempatan kerja.

(3) Ketahanan

Perencanaan dan pembangunan prasarana baru harus berhati-hati direncanakan agar ada kepastian ketahanan manfaat dan produksi pertaniannya bagi rakyat. Selanjutnya pengelolaan prasarana ini dilakukan oleh organisasi setempat dan harus diberdayakan. Biasanya pembangunan pedesaan harus dapat memberikan perhatian kepada perlindungan lingkungan dan konservasi sumber-sumber alam. Dengan demikian didalam meningkatkan pemeliharaan tanah dan air, metoda pertanian harus membuat nilai perlindungan tanah dan produktivitas menjadiimbang dalam sistem produksi serta tahan dan akrab terhadap lingkungan. Hal ini harus diasumsikan secara alami bahwa produksi yang disebutkan di (1) diatas harus tetap ada kesempatan kerja dan harus pula bertahan akan adanya tambahan pendapatan (2), dari pada harus menyediakan biaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh kebiasaan manusia.

(4) Kualitas hidup

Tujuan akhir pembangunan pedesaan adalah meningkatkan cara hidup kehidupan rakyat didaerahnya. Cara mempertahankan hidup dan meningkatkan keadilan dalam memperoleh

pendapatan, dilakukan bersama-sama diperi kehidupan yang terbuka, dirumah, pelayanan kesehatan umum, transportasi & kominikasi, fasilitas pendidikan dan unsur lain untuk meningkatkan cara hidup masyarakat. Ringkasnya, pembangunan pedesaan harus membangun pedesaan terpadu yang bertujuan meningkatkan standar hidup dan intinya yaitu meningkatkan aspek keras yaitu prasarana, yang ditopang oleh aspek lunak yaitu pelayanan kepada rakyat.

1.2. Pembangunan Pedesaan dan keberan-sertaan

(1) Tujuan dan latar belakang pembangunan pedesaan

Sampai akhir tahun 1970-an pembangunan pedesaan di negara berkembang dikonsentrasikan dipeningkatan produksi. Sejak saat itu tekanan mulai beralih ke penyediaan kebutuhan pokok kepada masyarakat miskin di desa. Peralihan ini telah memberi petunjuk adanya kesalahan kebijaksanaan pada orientasi pertumbuhan pembangunan yang laupau dalam mencapai hasil yang diharapkan dapat meringankan kemiskinan. Meskipun pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan tinggi, hal ini tidak usah mendorong kepada produktivitas dan kesejahteraan yang lebih tinggi lagi rakyat negara itu. Dari pada perbedaan sosio ekonomi antar daerah dan antar lapisan sosial hilang akibat cepatnya pertumbuhan penduduk. Didaerah pedesaan kemiskinan petani kecil saja akan menjadi nyata terlihat. Arah kebijaksanaan baru ada dua tujuan besar.

- a) Menyediakan kebutuhan dasar rakyat desa (khususnya yang paling miskin) dan memperbaiki kualitas hidup dengan cara mengentas keluar dari kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, menambah produksi pertanian dan memperbaiki daerah dengan menyediakan obat-obatan, pelayanan kesehatan dan perumahan.
- b) Mengajukan rakyat pedesaan agar berperan-serta secara spontan dan bebas selama proses pembangunan, untuk mencapai kemajuan di desa dan ditingkat tempat tinggalnya yang secara merata dibagikan dalam skala nasional dan daerah. Pendekatan ini menciptakan kerangka kerja yang dapat membawa keefektifan bersama usaha pemerintah dan tenaga kerja.

Pembangunan pedesaan semacam ini mulai ditangani secara serius di Asia ketika masalah rakyat tani dan daerah pedesaan yang disebut dengan polarisasi dan kemiskinan di kelas petani dan dikelas sosio-ekonomi yang rendah terbagi antara pedesaan dan perkotaan, hal itu menjadi begitu ekstrim sehingga menempatkan mereka sebagai ancaman stabilitas politik. Faktor yang mendorong kepada situasi ini berbeda antar negara, tetapi beberapa hal secara umum dapat terlihat.

Sebagai contoh yang disebut dengan "*green revolution*" (revolusi hijau) memperkenalkan varietas tanaman dengan hasil tinggi yang membuat kontribusi yang besar kepada peningkatan

produksi tanaman pokok. Namun tetap, yang paling besar diuntungkan adalah pemilik tanah dan petani bukan pemilik tanah tertinggal tidak mendapat keuntungan. Revolusi hijau nyatanya membuat lebih buruk pembagian kelas antar petani. Serupa dengan industriliasi maju yang terpusatkan ditengah kota menyebabkan menurunnya industri kerajinan tangan yang menjadi sumber pendapatan sekunder para petani kecil, membuat makin rendahnya kemiskinan dan pengangguran dipedesaan.

Maksud kebijaksanaan pembangunan modernisasi ekonomi telah menimbulkan permasalahan jauh melenceng dari harapan semula, kini akan diperkenalkan kebijaksanaan pembangunan, untuk meredam ancaman sosial dan stabilitas politik. Akibatnya kebijaksanaan pembangunan pedesaan terakhir telah ditinggalkan dari pengejaran produktivitas diatas segalanya, dan kini berbalik banyak sekali orang miskin di desa, sebagai usaha membawa kestabilisasi sosial dan semangat distribusi yang adil dari hasil pembangunan. Promosi pembangunan pedesaan sekarang membantu perspektif politik yang lebih realistik, yang dikenal dengan desa miskin berperan penting dalam menyempitkan pasar domestik dan menghalangi pembangunan ekonomi melalui industriliasi.

(2) Pentingnya keperan-sertaan pembangunan pedesaan

Hasil pembangunan pedesaan diharapkan meningkat agar dapat dibagi secara merata, tanpa pengecualian diantara yang memperoleh manfaat. Pada saat yang sama isu perbedaan daerah dan sanggahannya mendorong ketajaman isu tadi. Menanggapi kepada kecenderungan ini, organisasi untuk pembangunan pedesaan sekarang dibentuk menjadi organisasi koordinasi yang komprehensif (menyeluruh) yang menegaskan kebijaksanaan pembangunan pedesaan yang komprehensif yaitu menyatukan struktur dan fungsi berbagai lembaga yang terkait.

Dengan meningkatnya produksi beras, tekanan lebih diberikan kepada tanaman komersial dibanding padi dan beberapa tanaman percobaan dengan kombinasi lain. Tindakan-tindakan pembangunan pedesaan telah beralih ke pembukaan lahan yang meluas ketanah pertanian dan dapat mengakibatkan pekerjaan berubah dengan cara intensif. Kebijakan telah bergeser dari peluasan produksi pertanian dan memperbesar pasokan makanan pokok ke memajukan tanaman tumpang-sari dan ternak. Kebijakan baru lain merencanakan peningkatan distribusi, prosesnya dan pemasaran produksi pertaniannya dan peningkatan lingkungan hidupnya.

Telah lama dianjurkan untuk memberi peluang memperluas pertanian desa dengan demikian peningkatan pendapatan pertanian dapat didukung oleh kenaikan pendapatan bagi penduduk desa lain. Tetapi kebijaksanaan daerah pada waktu yang dekat akan dipersulit dengan adanya dorongan pekerjaan non-pertanian di pertanian desa dan kesulitan lain hal ini berarti hasil yang diharapkan tidak akan dapat tercapai di banyak daerah.

I Pembangunan Pertanian dan Pedesaan

Namun penduduk dan petani didaerah tidak memperhatikan janji besar bahwa rencana pembangunan daerah adalah rencana segera bagi mereka dari pada dengan negara maju, pelaksanaan proyek pembangunan pedesaan dengan cara pendekatan keperan-sertaan, diharapkan pembangunan proyek menjadi pembangunan daerahnya sendiri.

2. Pendekatan dalam kerjasama

2.1. Pendekatan dalam pembangunan pedesaan

Di kebanyakan negeri pada umumnya desa ditinjau sebagai hal yang seragam. Hal itu berakibat adanya kecenderungan yang kuat untuk menentukan sasaran pembangunan pada peningkatan taraf hidup secara nasional. adalah aneh apabila pendekatan yang bervariasi dan dapat direncanakan untuk kelompok yang berbeda, misalnya petani yang tidak memiliki tanah, petani kecil, tingkat rendah dan miskin dan lain sebagainya. Pendekatan yang terakhir ini memilih desa yang kelihatan tertinggal dalam keadaan sosial atau ekonomi dan membuat sasaran bantuan pemerintah kepada mereka. Metode yang berbeda dapat dipergunakan bilamana masyarakat pedesaan dikelompokkan menurut ciri sosial ekonomi. Misalnya strategi dalam pembangunan di Indonesia ialah membagi desa menurut tingkat kemajuannya dalam desa swadaya, swakarya dan swasembada. Desa didorong untuk meningkat dari satu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi dan kebijaksanaan telah dibuat bagi tiap tingkat. Pendekatan serupa dibuat di negeri Thailand untuk pemberantasan kemiskinan didesa pertanian sebagai salah satu bagian dalam Perencanaan Pembangunan Nasional ke lima bidang Sosial dan Ekonomi. Dengan metode ini diusahakan menetapkan daerah miskin melalui kriteria tertentu dan bantuan pemerintah yang diberikan guna mengatasinya.

Pendekatan untuk memperbaiki seluruh masyarakat pedesaan ini rupanya direncanakan dan dilakukan berdasarkan prasyarat tertentu. Ada anggapan, bahwa masih ada tradisi ketergantungan dan saling membantu antara masyarakat dan tradisi lama ini dapat disegarkan dengan bantuan pemerintah yang sesuai. Latar belakang pemikiran ini ialah ciri khas desa sebagai masyarakat yang berazas kerukunan. Telah diketahui, bahwa campur tangan pemerintah harus mengembangkan kerukunan dan kesatuan masyarakat ini dan mencegah sedapat mungkin timbulnya perbedaan kepentingan.

Pendekatan ke desa ini berlaku asal tradisi dalam penyelenggaraan desa masih berjalan. Beberapa penelitian membuktikan, bahwa ekonomi pasar dan perubahan mendasar yang menyusupi masyarakat pedesaan melunturkan tradisi ketergantungan. Selanjutnya manfaat bantuan pemerintah hanya dinikmati oleh golongan kaya yang tidak memerlukannya, sehingga manfaatnya itu tidak mungkin menetes sampai golongan miskin yang sebenarnya lebih memerlukan. Sehingga tidak ada contoh, bahwa ada peningkatan lapisan masyarakat.

Demikianlah bagi wilayah dengan lapisan dalam masyarakat pedesaan yang sudah maju, dengan perbedaan yang besar antara penduduk dalam hal sosial dan ekonomi lebih tepat menggunakan pendekatan yang dipusatkan pada perbaikan tertentu dalam masyarakat. Beberapa contoh cara pendekatan ini ialah proyek pembangunan pedesaan oleh Malaysian Federal Land Development Authority (Otorita Federal Pengembangan Lahan Malaysia), yang memusatkan diri pada

permukiman petani tanpa lahan, The Philippine KKK Program, National Livelihood Monument (Program KKK Filipina, Gerakan Mata Pencarian Nasional), yang bertujuan meringankan penderitaan masyarakat pedesaan yang menganggur. Sudah tentu pendekatan pada masyarakat pedesaan dan pendekatan pada sasaran golongan tidak mungkin dapat jalan secara terpisah sepenuhnya. Sebaliknya dua pendekatan itu harus bekerja bersama dengan mengingat perubahan dalam masyarakat yang sedang berlangsung. Penelitian mengenai hasil kerja sama semacam itu diperlukan sekali guna menemukan segi baru dalam perencanaan pembangunan pedesaan yang dapat membantu golongan pedesaan yang dapat membantu golongan pedesaan yang menderita seperti pekerja pertanian yang tidak memiliki lahan, petani penyewa dan pemuda pengangguran.

2.2. Tugas bagi administrasi pembangunan pedesaan

Pembangunan pedesaan memerlukan berbagai proyek untuk mengembangkan bidang pertanian, pengadaan bahan dan jasa produksi serta pelayanan sosial maupun konsumen. Proyek-proyek semacam itu melibatkan sejumlah instansi pemerintah. Tugas administrasi pembangunan pedesaan ialah mengkoordinasi usaha instansi ini agar instansi ini bekerja sama secara synergistik serta menyisihkan tugasnya sendiri.

Bilamana melihat pendekatan yang dipergunakan pada tugas ini di berbagai negeri, salah satu pendekatan ialah membentuk sebuah badan yang berdiri sendiri guna mengambil dan menjalankan metode yang khusus untuk membangun daerah pedesaan, yang mengkombinasikan bermacam-macam fungsi. Pendekatan lain ialah membuat suatu mekanisme untuk mengkoordinasi antar instansi. Contoh dari pendekatan di Malaysia ialah Federal Land Development Authority, yang tugasnya memungkinkan petani yang tidak memiliki lahan dan Area Development Authority, yang tugasnya seluruh pengembangan daerah pertanian yang ada. Kecuali mengenai reklamasi lahan badan-badan ini berwenang besar dalam pengadaan bahan dan jasa produksi. Di Filipina dipergunakan metode Integrated Area Development (Pengembangan Wilayah Terpadu), yang serupa dengan yang dipergunakan di Malaysia, tetapi diberi tekanan pada pemakaian sebuah badan utama untuk mengkoordinasikan usaha pembangunan pedesaan dari semua instansi yang bersangkutan.

Pendekatan yang terakhir, dengan tujuan mengadakan koordinasi, diikuti banyak negeri dengan bersemangat. Sebuah badan koordinasi dibentuk di tingkat nasional mencakupi kepala pemerintahan dan lainnya yang setingkat untuk mengkoordinasikan kebijaksanaan semua instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan yang serupa diadakan pula ditingkat wilayah. Badan ditingkat pusat terutama lebih bersangkutan dengan penyusunan sebuah kerangka guna memberi pengarahan dan membagi anggaran secara keseluruhan daripada mengkoordinasikan kebijaksanaan individual. Sebaliknya badan tingkat administrasi wilayah diharapkan memperhatikan garis

kebijaksanaan yang diberikan dari pusat maupun kebutuhan dan keinginan penduduk wilayah dalam membuat revisi pada dan mengkoordinasikan tindakan tiap bidang.

Peranan tradisional pemerintahan di daerah pada umumnya memelihara ketenteraman dan stabilitas di daerah di samping melaksanakan dengan patuh kebijaksanaan pemerintah pusat. Akan tetapi dengan diadakannya kebijaksanaan pembangunan pedesaan peranan pemerintahan di daerah bertambah banyak. Misalnya salah satu segi peranan pemerintahan di daerah ialah mewujudkan dengan tepat kebutuhan dan keinginan pada tingkat desa dalam pelaksanaan proyek pembangunan pedesaan di tingkat daerah maupun desa. Terutama apabila perencanaan proyek pembangunan pedesaan di lapangan harus berhasil maka diperlukan pekerjaan terperinci dan responsif di tingkat pemerintahan yang paling rendah. Untuk itu tiap negeri melakukan segala usaha yang mungkin guna memperkuat dan mengkoordinasikan perencanaan dan kemampuan melaksanakan di tingkat daerah.

Namun pemerintahan di daerah seringkali merupakan tidak lebih daripada pengumpulan instansi setempat dari pemerintah pusat dipimpin oleh seorang kepala yang ditunjuk oleh pemerintah pusat (walaupun di Filipina mereka itu dipilih). Dalam praktek cabang departemen di daerah penuh dengan anggota staf yang dikirim dari departemen dan tiap kantor mendapat anggarannya dari kantor pusat (kementerian) nya. Hal ini berarti kewenangan gubernur dan walikota yang ditunjuk oleh pusat itu terbatas, sehingga menjadi hambatan besar bagi pengkoordinasian yang berhasil pada pembangunan pedesaan di tingkat daerah.

2.3. Peran-serta dan perencanaan dari bawah

Ada dua cara guna mendorong peran serta masyarakat pedesaan yang bersemangat pada pembangunan. Yang pertama ialah membentuk Lembaga Pembangunan Desa pada tingkat yang paling rendah dalam pemerintahan di daerah. Lembaga ini yang terdiri dari pembina yang ditugasi kepala desa bagi tiap tingkat yang ada dalam desa. Lembaga ini menganjurkan perencanaan dan pelaksanaan proyek berdasarkan kebutuhan penduduk desa. Mereka itu mendapat bantuan teknis dari instansi pemerintah di daerah dan kadang-kadang ada cara guna membantu pembangunan desa dengan biaya. Contoh cara itu ialah Instruksi Presiden Pembangunan Desa (Inpres Desa) dan Thai Kampung Development Fund on Village Committee.

Sebaliknya organisasi masyarakat pedesaan mendapat bantuan lewat saluran resmi telah maju ke banyak daerah termasuk perkumpulan petani, perkumpulan simpan-pinjam, perkumpulan pemakai air, perkumpulan wanita maupun remaja untuk menaikkan taraf hidup. Organisasi masyarakat di tingkat desa ini mempunyai tujuan membuat saluran untuk menghubungkan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah terdorong oleh usaha masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya. Bersamaan dengan itu organisasi itu membiarkan masyarakat berlaku

sebagai partner dalam proses pembangunan desa lewat pengerahan bebas sumber setempat. Seringkali organisasi ini sayang sekali tidak aktif apabila dana dari pemerintah habis. Satu soal yang umum ialah bila organisasi itu menyebabkan penduduk desa dikuasai oleh beberapa orang yang berpengaruh.

Adapun cara yang kedua ialah menyusun perencanaan dari bawah keatas di tingkat desa. Metode ini melalui diskusi dan koordinasi membuat satu kesatuan tujuan bagi penduduk desa. Metode ini juga dapat memecahkan soal yang diluar usaha desa secara sendiri-sendiri. Akan tetapi utusan yang mewakili dalam proses perencanaan semacam ini umumnya kurang pengetahuan dan pengalaman. Dalam hal ini diperlukan bantuan pejabat di daerah yang mampu-nyai lebih banyak pengetahuan-pengetahuan teknis maupun manajemen. Keperan-sertaan ini mudah mengurangi kebebasan dan kekuasaan desa-desa.

2.4. Pembentukan badan di tingkat desa

Pengalaman di banyak negeri menunjukkan bahwa adanya badan di tingkat desa itu amat penting bagi kemajuan perencanaan pembangunan pedesaan dan lebih lagi bagi perbaikan kehidupan penduduk desa. Secara umum badan yang dibentuk dengan prakarsa di daerah amat efektif dalam pembangunan desa pertanian. Seringkali menerima bantuan pemerintah untuk memperluas jangkauan lebih dari pada yang mampu dilaksanakan. Ini terjadi karena pemanfaatan badan tingkat desa diakui berguna dalam politik dengan pertimbangan :

- a) Mengurangi risiko keresahan dan ketidaksepakatan dalam masyarakat dan memperluas pengaruh politik ;
- b) Untuk melaksanakan pembangunan pedesaan menurut arah yang ditentukan oleh pemerintah perlu diciptakan satu pihak ketiga, yang mampu mengadakan tekanan terhadap terhadap lembaga birokrasi.
- c) Guna melaksanakan pembangunan pedesaan diperlukan pengumpulan sumbangan setempat dari penduduk desa. Hal ini menyebabkan pemerintah ketat membatasi bantuan dan tenaga penduduk lewat badan di tingkat desa. Pada tabel dibawah dicantumkan daerah-daerah dimana pemerintah dapat mempunyai hubungan baik dengan badan di tingkat desa.

(1) Pembagian anggaran biaya

Di banyak negara yang sedang berkembang ada kecenderungan umum untuk memberatkan pembagian investasi umum kepada industri dan kota, sebaliknya para politisi dan birokrat lebih mementingkan pembangunan pedesaan. Akan tetapi perlu diketahui, bahwa selamanya anggaran biaya tidak cukup buat semua dan sumber keuangan perlu dipergunakan dengan efektif. Oleh karena itu pemerintah harus berusaha membuat pembagian anggaran biaya yang dapat mencukupi kebutuhan dan prioritas penduduk pedesaan dan melaksanakan program pembangunan pedesaan yang memperkuat jiwa kebebasan. Pemerintah mudah tergelincir kearah paternalisme, cenderung memupuk perasaan tergantung pada pemerintah pada penduduk pedesaan. Untuk menghindarkan hal ini pemerintah-pemerintah harus berpegangan pada kebutuhan dan prioritas yang sebenarnya melalui pertemuan teratur untuk mengumpulkan informasi. Badan ditingkat desa di sini mempunyai peranan berguna selaku perantara pemerintah dengan desa.

(2) Bantuan kepada badan di tingkat desa

Di banyak negara badan ditingkat desa dimanfaatkan sebagai alat guna pengendalian kehidupan politik di daerah, sehingga kehilangan kepercayaan penduduk desa. Proyek pembangunan pedesaan yang tujuannya orang miskin dapat dikendalikan oleh sekelompok orang berpengaruh memperparah kehilangan kepercayaan umum kepada pemerintah. Pelatihan penduduk desa oleh badan ditingkat desa dalam manajemen dan pengetahuan lain yang terkait harus mampu memberi perlindungan yang efektif terhadap tekanan dan pengaruh dari luar semacam ini. Pelatihan semacam ini harus direncanakan tahu dipilih untuk memenuhi kebutuhan dan prioritas masyarakat.

(3) Pembaharuan administrasi

Pemerintah-pemerintah harus percaya kepada mekanisme birokrasi dalam memberi bantuan dan pelayanan kepada penduduk desa, tetapi seringkali kekurangan staf, fasilitas dan organisasi yang betul untuk memberi pelayanan yang diperlukan kepada badan ditingkat desa.

a) Pembaharuan badan pemerintahan

Bantuan bagi masyarakat desa harus disalurkan melalui saluran yang ada, dari pada secara khusus melalui saluran birokrasi. Misalnya sektor swasta dapat dipakai untuk membagi bahan pertanian melalui jaringan pembagian, tidak perlu menggunakan badan pemerintah, bebas untuk memusatkan pengawasan dan koordinasi, bantuan ditingkat desa dapat dipercayakan kepada badan di luar pemerintah.

b) Desentralisasi kewenangan pemerintah

Sebagian besar pemerintah berusaha untuk mengeralikan sebagian kewenangan kepada daerah, akan tetapi seringkali prosesnya memerlukan waktu lama sebelum dicapai hasil. Penyerahan kewenangan yang cepat mengenai pelaksanaan dan manajemen proyek kepada pemerintah di daerah diinginkan sekali.

c) Meningkatkan semangat petugas lapangan

Dengan latihan yang sistematis dapat ditingkatkan, banyak caranya petugas lapangan di tempat membina hubungan dengan penduduk desa dan dalam membantu mereka membentuk dan menyelenggarakan badan. Bagi petugas lapangan yang harus mengetahui keadaan bila menghadapi penduduk desa yang miskin dan harus melakukan tindakan yang efektif, latihannya yang khusus harus dibuat berdasarkan pengalaman di lapangan. Rencana pembangunan pedesaan yang berhasil tergantung pada semangat petugas lapangan yang harus mempraktekkan sesungguhnya. Petugas lapangan yang biasa bekerja dengan keadaan amat kurang baik dibanding dengan yang dapat dinikmati oleh rekannya di kantor pusat dan diperlukan perhatian besar dalam pengurusan personel yang akan dapat memperbesar semangat.

2.5. Metode perencanaan pembangunan dan pedesaan

(1) Rangka rencana yang konkrit

a) Daerah yang menjadi sasaran rencana

Yang dituju pembangunan pedesaan ialah sudah tentu desa-desa, akan tetapi ukurannya dan kantor yang dimilikinya yang mampu melakukan fungsi administrasi dari badan yang berdiri sendiri bervariasi antara negara-negara. Misalnya di negeri Jepang di pertengahan masa Meiji "desa" berukuran lebih kecil dari pada yang ada sekarang, kemampuannya dalam administrasi tidak besar dan tingkat pendidikan penduduk desa masih lebih rendah daripada sekarang. Selebihnya itu "dukuh" yang dahulu merupakan bagian yang membentuk desa tidak memiliki suatu kantor macam apapun juga yang mempunyai kekuasaan baik administratif maupun eksekutif. Jikalau pembangunan desa direncanakan dalam keadaan itu maka subyek dalam perencanaan tidak dapat ditingkatkan hingga daerah. Bahkan jikalau desa itu tidak pada tingkatan berkemampuan eksekutif seperti yang biasa dijumpai pada negara yang sudah berkembang, desa itu tetap menjadi satuan yang sesuai dengan desa di Jepang semasa Meiji bervariasi antara negara-negara, tetapi prinsip tersebut diatas tetap berlaku. Dengan singkat "desa" yang

dijadikan subyek perencanaan dalam laporan ini harus dianggap berarti "unit yang terkecil dari pemerintah daerah yang masih memiliki kekuasaan administrasi bebas dan yang mampu mengeluarkan pendapat dengan bebas mengenai proses perencanaan".

- b) Hubungan dengan rencana tingkat lebih tinggi dan dengan rencana di kota maupun desa berdekatan

Di negeri Jepang misalnya rencana tingkat lebih tinggi yang mencakupi kota besar, kota kecil dan desa adalah lingkungan kotapraja yang luas, dan rencana lingkungan kehidupan setempat sedang rencana setingkat lebih tinggi adalah rencana daerah serta rencana kotapraja. Apabila membuat rencana bagi desa untuk kemudian hari, rencana itu harus dipikirkan hubungannya dengan rencana tingkat yang lebih tinggi maupun rencana bagi desa yang berdekatan guna mencegah gangguan dan ketidakcocokan. Bahkan seandainya tidak ada rencana tingkat tinggi maupun rencana daerah berdekatan yang memerlukan koordinasi mungkin masih dapat timbul soal, bergantung pada tingkat pembangunannya. Kesulitan semacam ini harus dihindarkan dan bilamana mungkin rencana pembangunan daerah yang meliputi tiap desa harus dipelajari sebagai suatu metoda kasus sebagai bagian dalam proses pembuatan rencana. Tingkat koordinasi ini barangkali agak tidak mudah.

Diantara negara-negara keadaannya berbeda dan tidaklah mudah untuk membuat lebih dari pedoman berdasarkan kasus, akan tetapi apabila suatu rencana dibuat khas untuk satu desa sendiri tanpa memperhatikan hubungannya dengan sekitar ada kemungkinan besar, bahwa rencana itu sendiri maupun proyek yang dibuat berdasarkan itu tidak akan berhasil didaerah. Pendekatan yang mendasar ialah harus memperhatikan keadaan yang lebih luas, agar proyek-proyek yang bekerja sama tidak berakhir laksana tanaman dalam pot, terpisah dari sekitarnya.

- c) Isi rencana

Rencana pembangunan pedesaan walaupun hendak meningkatkan bidang pertanian sebagai tujuan utama harus membuat pemandangan menyeluruh mengenai kemajuan desa di kemudian hari. Isi rencana harus memperjelas bagaimana penduduk dari tingkat ekonomi manapaun memanfaatkan sumberdaya yang mana (lahan, air dan lain sebagainya) serta lingkungan alam maupun kehidupan macam apa yang hendak ditempati.

- 1) Kombinasi industri apa dan tenaga kerja apa yang hendak dicapai sasaran tingkat ekonomi ;

- 2) Sumberdaya apa (lahan, air dan lain sebagainya) yang harus dipergunakan dan bagaimana caranya ;
- 3) Bagaimana caranya membuat perbaikan yang diperlukan menuju industri ;
- 4) Apakah penggunaan dan pembatasan pada pemanfaatan lahan dan sumberdaya lain dan perbaikan lahan apakah yang diperlukan guna mencapai tingkat lingkungan yang dijadikan sasaran ;
- 5) Bagaimana caranya mencapai perbaikan

(2) Perencana dan data

a) Perencana

Perencana yang harus menyusun perencanaan adalah tenaga ahli yang dikirim dari negeri Jepang sedang pendampingnya dari negara pendamping. Perencana dari negeri pendamping ini dapat dipandang sebagai spesialis dari *village halls* yang disebut diatas atau kantor pemerintah daerah atau dari konsultan. Jikalau negara pendamping dalam proyek kerjasama diharapkan mencapai jangkauan sejauh yang pernah dicapai dalam program perbaikan kota dan desa dalam pertengahan masa Meiji di Jepang, proyek hendaknya jangan berakhir dengan rencana yang hanya dibuat oleh perencana dari Jepang. Sebaliknya sangat berarti bila memanfaatkan proses perencanaan sebagai kesempatan untuk alih pengetahuan dan teknik kepada perencana dari negara pendamping, agar mereka itu dapat melakukan sendiri perencanaan bagi desa lain.

b) Data statistik dan informasi lain yang diperlukan buat perencanaan

Di negara manapun tidak dapat dijamin, bahwa data statistik, peta, dokumen perencanaan terkait maupun informasi lain akan teliti atau akan tersedia ketika diperlukan. Pada dasarnya data yang dapat diperoleh di desa yang bersangkutan harus sentral dan harus dilengkapi dengan survey lapangan oleh tim proyek. Jikalau penyelidikan tambahan itu sangat luas atau kompleks terdapat resiko, bahwa kegairahan atau potensial perencana lokal untuk menyusun perencanaan kelak sesudah proyek selesai akan menurun. Biasanya proyek harus direncanakan berdasarkan informasi minimum yang diperlukan dengan pendekatan yang lentur sesuai kasusnya dalam pengumpulan informasi.

c) Keperan-sertaan

Rencana itu sudah tentu diijinkan agar mewujudkan pendapat para penduduk yang

berkepentingan. Sifat keperan-sertaan para penduduk pada pembuatan rencana dan sifat grup studi lokal yang membantu proses perencanaan akan bervariasi bergantung kepada tingkat pendidikan penduduk, pemimpin mereka, hubungan dengan organisasi sosial maupun organisasi penduduk dan lain sebagainya. Metoda dan ide harus dipikirkan secara luwes tiap waktu untuk disesuaikan dengan keadaan di negara pendamping.

(3) Survai dan diagnosa

a) Survai pencarian fakta

Keadaan yang ada diselidiki dan hasilnya dipergunakan membuat diagnosa masalah apa yang sedang dihadapi dan apa yang diperlukan dari kegiatan kerjasama di kemudian hari.

i) Penduduk

1) Penduduk dikelompokkan menurut umur dan kelamin

Jumlah penduduk menurut kelamin dengan jarak 5 tahun sebaiknya diperoleh di desa sejak sepuluh tahun terakhir.

2) Kedatangan dan kepergian penduduk

Jumlah penduduk masuk ke dan keluar dari desa harus dibedakan dengan perubahan penduduk alamiah dan harus diperoleh selama jangka waktu 5 tahun, dibagi menurut kelamin dengan jarak 5 tahun.

3) Penduduk bekerja di tiap cabang industri

Dalam seluruh angkatan kerja, angka jumlah penduduk yang mencari pekerjaan, jumlah sebenarnya yang bekerja (dibagi menurut industri dan kelamin) harus diperoleh, seyogyanya selama 5 tahun.

4) Penduduk pulang – pergi bekerja

Angka harus diperoleh mengenai jumlah penduduk desa yang bekerja di luar desanya dengan pulang-pergi dan jumlah pekerja di desa yang pulang-pergi dari luar, sebaiknya selama minimal 5 tahun.

ii) Sumberdaya lahan dan air

Seyogyanya harus diperoleh peta topografi skala 1: 50.000 - 1:10.000. Kecuali itu

harus diselidiki pula status tataguna tanah, hak milik serta garis pemisah pembatasan menurut hukum dalam tataguna tanah harus diselidiki pula.

Sumberdaya air seperti sungai, danau dan kolam, mata air maupun sumber air lain, waduk dan pemanfaatan air harus diselidiki juga.

iii) Iklim dan hidrologi

Iklim desa termasuk suhu udara, jumlah jam sinar matahari, curah hujan, kecepatan dan arah angin, embun dan embun beku, taufan dan bencana alam lain harus diselidiki terutama berkenaan dengan usaha pertanian didaerah.

iv) Tanah

Survai tanah lahan pertanian maupun lahan yang dipertimbangkan dibangun menjadi lahan pertanian terutama dengan pemilihan tanaman yang tepat dan cara meningkatkan kesuburan tanah.

v) Tingkatan ekonomi

Pendapatan rata-rata tiap keluarga dan pendapatan tiap keluarga ditiap cabang industri (terutama pendapatan tiap keluarga pada keluarga pertanian dan bukan pertanian) harus diselidiki.

vi) Produksi industri

Untuk mempertimbangkan cara memajukan pertanian diperlukan penyelidikan produktivitas industri terutama di bidang pertanian, luas panen, hasil produksi, volume pengapalan dan pengumpulan dan lain sebagainya.

vii) Basis industri

Untuk mempertimbangkan cara memperbaiki basis pertanian diperlukan penyelidikan tentang fasilitas basis industri di tiap cabang industri terutama lahan pertanian, tingkat perbaikan, fasilitas irigasi dan drainase, jalan pertanian, fasilitas pengumpulan dan pengapalan, pembangunan tempat pengolahan dan penyimpanan dan lain sebagainya dalam usaha pertanian.

viii) Fasilitas lingkungan hidup

Jumlah dan keadaan fasilitas seperti misalnya pipa saluran air bersih dan pembuangan air, taman, balai pertemuan, rumah sakit, bangunan ibadah harus disurvei.

ix) Keadaan prasarana umum

Berkaitan dengan produksi, proses dan pengapalan hasil pertanian dalam pembangunan desa diperlukan survey tentang perkembangan jalan, sungai, jalan kereta-api, pelabuhan, tenaga listrik, telekomunikasi dan lain sebagainya.

x) Pemeliharaan lingkungan dan pencegahan bencana

Harus disurvei pencemaran udara, air dan tanah, perlindungan ekologi satwa dan tumbuhan, kejadian bencana serta cara pencegahannya.

b) Diagnosa

Tingkat pengendalian kependudukan, komposisi industri, tingkat kesempatan kerja dan pengangguran, tingkat pendapatan, produktifitas pertanian, pemanfaatan sumber lahan dan air, tingkat pembangunan prasarana, tingkat pemeliharaan lingkungan dan faktor lain harus dibandingkan dengan rata-rata keadaan dalam negeri secara keseluruhan serta di negara lain. Sebuah diagnosa harus dibuat dengan cara yang tepat mengenai faktor-faktor ini maupun data hasil dalam negeri, kemampuan perencanaan setempat serta faktor lain. Proses ini harus dijalankan dengan menyadari adanya pendapat-pendapat penduduk dalam survey dan harus dicapai konsensus antara para perencana dan Lembaga Studi Perencanaan Pembangunan Desa (nama sementara). Isi diagnosa tidak sama antara kasus-kasus, tetapi yang penting unsur berikut.

i) Kependudukan

- Apakah penduduk masih dalam skala yang diperbolehkan bagi desa, bilamana disamakan dengan kapasitas perpaduan dari penduduk desa?
- Adakah penyimpangan pada perincian penduduk menurut umur dan kelamin? Apakah penduduk yang masuk dan keluar masih dalam batas, adalah tindakan untuk mengoreksi (pembatasan kelahiran dan lain sebagainya), yang perlu diambil?
- Apakah perbandingan antara yang bekerja, yang menganggur dan pekerjaan di luar desa dalam batas yang dapat diterima? Apabila keadaan itu melebihi batas yang diinginkan,

adakah tindakan untuk mengoreksi (penciptaan kesempatan kerja baru skala besar dan lain sebagainya) yang perlu diambil ?

- Apakah perincian penduduk bekerja dalam industri dalam batas yang diinginkan? Apabila tidak, adakah tindakan untuk mengoreksi (pembatasan kelahiran dan lain sebagainya), yang perlu diambil?

ii) Sumberdaya lahan dan air

- Masih adakah lahan untuk pembangunan selanjutnya?
- Apakah yang menjadi potensial untuk pembangunan selanjutnya, mengingat penyebaran sumber daya yang masih dapat dikembangkan?

iii) Iklim dan hidrologi

- Apakah tanaman yang ada sekarang sesuai dengan keadaan iklim dan hidrologi?
- Adakah potensial untuk memperkenalkan tanaman baru?

iv) Tanah

- Adakah soal erosi tanah atau pemeliharaan kesuburan tanah?
- Apakah tanaman yang ada sekarang sesuai dengan tanahnya?
- Adakah potensial untuk memperkenalkan tanaman baru?

v) Tingkat ekonomi

- Apakah keadaan perekonomian di tingkat yang diinginkan? Bilamana keadaannya masih ditingkat yang belum memadai, adakah tindakan perbaikan yang diinginkan meliputi banyak kemungkinan?

vi) Produktivitas industri

- Khususnya sehubungan dengan pertanian apakah ada masalah dengan tingkat stabilitas produksi, kualitas produksi dan pengumpulan dan sistem pengapalan?
- Bilamana diperlukan peningkatan produksi pertanian, apakah hambatan utama yang harus diatasi?

vii) Basis industri

- Berkaitan terutama dengan industri apakah perkembangan basis prasarana dalam batas yang diinginkan? Bilamana tidak, apakah hal-hal yang terpenting untuk perbaikan (misalnya tindakan guna mengatasi kekeringan)?

viii) Fasilitas lingkungan hidup

- Apakah tingkat pembangunan fasilitas lingkungan hidup dalam batas yang diinginkan? Bilamana tidak, hal-hal terpenting apakah untuk perbaikannya (misalnya perbaikan saluran pipa utama air bersih)? Apakah keluhan para penduduk mengenai bahaya yang ada dalam lingkungannya?

ix) Status prasarana umum

- Apakah tingkat pembangunannya sudah dalam batas yang diinginkan? Bilamana tidak, hal-hal terpenting apakah untuk perbaikannya (misalnya pembuatan dan perbaikan jalan utama yang menghubungkan desa-desa dengan kota besar di daerah)?

x) Pemeliharaan lingkungan dan pencegahan bencana

- Apakah tingkat pembangunannya sudah dalam batas yang diinginkan? Bilamana tidak, hal-hal terpenting apakah untuk perbaikannya (misalnya pencemaran air sungai)?

(4) Penyusunan rencana

a) Penetapan sasaran

Nilai sasaran yang harus dicapai oleh tahun sasaran rencana harus ditetapkan (misalnya 10 tahun sejak awal rencana). Penetapan sasaran memerlukan konsensus antara para perencana dan Lembaga Studi Perencanaan Pembangunan Desa (nama sementara). Macam sasaran yang harus ditetapkan bervariasi antara kasus, namun pada umumnya apa yang disebut dibawah dapat dipakai.

- i) Jumlah penduduk, angkatan kerja, penduduk bekerja, penduduk yang bekerja di tiap cabang industri, penduduk yang bekerja dibidang pertanian;
- ii) Pendapatan rata-rata tiap keluarga, pendapatan keluarga bukan pertanian, pendapatan keluarga pertanian;
- iii) Produktifitas di tiap cabang industri, produktifitas pertanian;
- iv) Luas lahan yang digunakan di tiap usaha, luas lahan pertanian
- v) Tingkat pembangunan lingkungan hidup;

- vi) Tingkat pembangunan prasaranaan umum
- b) Pengujian kebijaksanaan untuk mencapai sasaran

Cara mencapai sasaran tiap sasaran harus dipelajari dan kebijaksanaan dijelaskan. Misalnya harus diputuskan sasaran yang mana sajakah yang hendak dicapai oleh proyek-proyek yang termasuk proyek pemerintah yang harus dicapai dalam rangka proyek bantuan Jepang, mana yang harus dicapai dengan bimbingan pemerintah dan mana yang diharapkan tercapai dengan sendiri apabila kecenderungan yang ada sekarang berlangsung terus. Studi ini memerlukan konsensus antara perencanaan dan Lembaga Studi Perencanaan Pembangunan Desa (nama sementara).

- c) Penyusunan rencana

- i) Perencanaan kependudukan

- Jumlah penduduk

Jumlah penduduk yang direncanakan dalam daerah harus dihitung dari keadaan penduduk menurut umur dan kelamin dengan interval 5 tahun, angka remainder yang direncanakan (rata-rata tingkat nasional dan lain sebagainya), angka kelahiran yang direncanakan (rata-rata tingkat nasional dan sebagainya), angka kepindahan dari daerah, angka kedatangan ke daerah.

- Jumlah penduduk yang bekerja

Jumlah penduduk usia kerja yang direncanakan menurut kelamin dan umur dan persentase pencari kerja dapat dipergunakan buat menghitung jumlah penduduk pencari kerja yang direncanakan dalam daerah. Penduduk yang pulang-pergi bekerja di luar daerah harus diperhitungkan pada perhitungan jumlah penduduk pencari kerja di daerah. Pada tahap perencanaan industri harus dipertimbangkan berapapun perbandingan jumlah penduduk didaerah yang berhasil mendapat pekerjaan. Angka jumlah penduduk yang bekerja dan menganggur pada kasus itu dapat bervariasi banyak sesuai dengan status industri dan keadaan ekonomi dalam negara.

Penduduk bekerja di tiap cabang industri dibuat penggolongan menurut industri primer, sekunder dan tersier.

- Penduduk yang bekerja di pertanian dibuat penggolongan yang bekerja pada industri primer dan dikerjakan di pertanian.

ii) Perencanaan penggunaan sumberdaya lahan dan air

▪ Perencanaan penggunaan lahan

Kebutuhan lahan dalam perencanaan kependudukan, pengembangan industri, pembangunan lingkungan hidup, pemeliharaan lingkungan, pencegahan bahaya dan tujuan lain dari tiap departemen harus dihimpun, tanah yang memenuhi syarat harus dibagi untuk tiap keperluan. Koordinasi antara kepentingan yang berbeda diperlukan apabila terjadi pertentangan.

▪ Perencanaan penggunaan air

Senada dengan kebutuhan lahan, kebutuhan dari tiap departemen (industri, pemukiman, pemeliharaan lingkungan) harus dihimpun. Apabila diperlukan tambahan pengembangan sumber air, harus dipelajari kemungkinan-kemungkinan dan koordinasi antara kepentingan yang berbeda diperlukan bilamana terjadi pertentangan.

Perbincangan harus dilangsungkan dengan "trial and error" berulang lewat usul rancangan, pengujian biaya dan harapan selesai dengan berhasil, pengujian prioritas antar instansi, feedback hasil perbincangan dan pengujian ulang rancangan awal.

iii) Perencanaan perekonomian

Sasaran pendapatan rata-rata tiap keluarga dan tiap keluarga pertanian dan lain sebagainya harus diuji guna menentukan kemungkinan pencapaian dengan bantuan rancangan pengembangan industri di tiap cabang industri. Sasaran yang sukar dicapai harus ditinjau kembali.

iv) Rencanan pengembangan perindustrian

Sasaran penduduk bekerja dan pendapatan tiap keluarga pada tiap cabang industri harus diuji untuk menetapkan kemungkinan pencapaiannya. Sasaran yang sukar dicapai harus ditinjau kembali. Akan tetapi dengan mengecualikan pertanian isinya rencana memajukan industri (misalnya daya tarik pabrik, rencana mengenai konstruksi, produksi, kesempatan kerja, upah dan lain sebagainya) tidak selalu harus tercapai di tiap negara, bahkan bilamana rencananya mengandung usul khusus yang dibuat berdasarkan data yang teliti. Diperlukan tanggapan yang melentur berdasarkan keadaan sebenarnya pada tiap kasus (misalnya sasaran didasarkan pada kecenderungan yang sedang ada dan lain sebagainya).

Di bidang pertanian tindakan utama untuk mewujudkan pembangunan kemudian hari yang diinginkan dalam rencana pembangunan desa harus dijelaskan. Tindakan ini buat tiap tanaman pokok terdiri dari daerah penanaman yang direncanakan, produksi yang direncanakan dan volume serta nilai pengapalan yang direncanakan. Sesudah pokok-pokok penyempurnaan pada rencana pembangunan desa telah dipilih dengan tekanan pada kemajuan di bidang pertanian, para perencana harus bersama-sama dengan Lembaga Studi Perencanaan Pembangunan Desa dan penduduk desa mengadakan tukar-menukar pandangan mengenai prioritas dan bekerjasama dalam perbincangan (pokok-pokoknya mungkin termasuk reklamasi besar-besaran lahan pertanian, kenaikan besar produktifitas lahan yang sudah dikerjakan, perbaikan mendasar fasilitas irigasi dan drainase dan kenaikan penting pada distribusi).

v) Rencana mengembangkan basis industri

Agar dibuat rencana pengembangan basis produksi yang diperlukan untuk mencapai rencana pemajuan tiap cabang industri. Di bidang pertanian diperlukan rencana bagi tiap macam tanah untuk reklamasi lahan pertanian, pengembangan lahan, pembangunan irigasi dan drainase, pembangunan jalan pertanian, fasilitas pengumpulan dan pengapalan dan fasilitas pengolahan serta penyimpanan.

vi) Rencana pembangunan prasarana lingkungan hidup

Agar dibuat rencana perbaikan lingkungan desa kecil dan pembangunan fasilitas seperti misalnya pipa saluran air bersih dan pembuangan, taman, balai pertemuan, gedung sekolah, rumah sakit dan tempat beribadah.

Pembangunan yang sudah masuk program pembangunan dari negara pendamping harus disatukan dalam rencana.

vii) Rencana pembangunan prasarana umum

Agar dibuat rencana pembangunan jalan, sungai, jalan kereta-api, pelabuhan, tenaga listrik, telekomunikasi dan lain sebagainya.

Pembangunan yang sudah masuk program pembangunan dari negara pendamping harus disatukan dalam rencana.

viii) Rencana pembangunan pemeliharaan lingkungan dan pencegahan bahaya

Agar dibuat rencana tindakan khusus, yang hendak diperlukan guna mencapai sasaran dalam pemeliharaan udara, air dan aspek lain. Tindakan khusus yang diperlukan harus direncanakan pula guna pemeliharaan ekologi satwa dan tumbuhan dan untuk pencegahan bahaya.

Pembangunan yang sudah masuk program pembangunan dari negara pendamping harus disatukan dalam rencana.

d) **Penyusunan usul proyek dan pengujian prioritas**

Implementasi rencana-rencana tersebut diatas harus dihitung biayanya dan dituangkan menjadi sejumlah proyek khusus. Sudah tentu anggaran biaya guna implementasi proyek-proyek ini terbatas. Perkiraan batas biaya harus dihitung dari anggaran biaya program pembangunan dari negara pendamping dan anggaran biaya proyek Jepang. Jumlah anggaran biaya ini kemudian harus dibagi antara rencana pembangunan tiap departemen. Sasaran pembangunan pada tiap program itu terbatas dan barangkali tidak mungkin melaksanakan rencana pembangunan secara komprehensif mencakup semua departemen. Proyek yang hanya mempunyai harapan realistis sedikit untuk berhasil dalam pelaksanaannya harus dikeluarkan dari rencana-rencana. Prioritas tiap proyek harus diuji dan agar dibuat urutan prioritas untuk menentukan urutan dalam pelaksanaan.

(5) **Pemeriksaan rencana dan pembuatan konsensus antara penduduk dan instansi bersangkutan**

a) **Pemeriksaan kemampuan administratif melaksanakan proyek**

Pegawai pemerintah daerah yang hendak diberi tugas administrasi dan perencanaan serta pelaksanaan konstruksinya dan mengurus sub-kontraktor harus diperhatikan dan dibuatkan petunjuk mengenai segenap problem dan cara menghadapinya. Apabila ada kesukaran besar dalam kemajuan proyek, rencana pembangunan tiap departemen harus ditinjau kembali dan diubah.

b) **Pemeriksaan dampak lingkungan**

Agar diselidiki seluruh dampak proyek terhadap lingkungan dalam pelaksanaan dan agar dicari keterangan hubungan antara sifat maupun tingkat dampak dan sasaran yang sudah ditetapkan dalam perlindungan lingkungan.

c) Kesepakatan dengan penduduk dan dengan instansi pemerintah

Agar dijelaskan kepada penduduk rencana-rencana bilamana selesai dan agar diusahakan persetujuan mereka. Kesepakatan serupa harus dicapai pula dengan instansi yang berkewajiban dalam rencana tingkat lebih tinggi dan rencana lain berkaitan.

(6) Lain-lain

Pembinaan tersebut di atas didasarkan atas anggapan, bahwa tergolong mudah untuk memperoleh data referensi yang diperlukan guna memikirkan rencana-rencana dan bahwa tingkat pelatihan para perencana dari negara pendamping yang berpartisipasi dalam pembuatan rencana termasuk baik. Diharapkan pula, bahwa dikemudian hari perencana-perencana kepunyaan negara pendamping mampu memikirkan rencana semacam itu dengan usaha sendiri. Keadaan ini tidak sama antara negara dan antara kasus, sehingga masih diperlukan beberapa penyesuaian pada pendekatan pada tiap kasus mengingat isi dan metodologi dari proses perencanaan.

2.6. *Metoda alih teknik konstruksi*

(1) **Introduksi teknologi kepada negara Jepang di masa lampau ("Wakon Kansai", semangat Jepang dikombinasikan dengan pengetahuan Cina).**

"Wakon Kansai" didukung oleh Michizane Sugawara (845-903) yang memberi tekanan pada perpaduan pengetahuan yang masuk dari Cina dengan mempertahankan semangat Jepang. Bahasa Jepang dan Cina itu berbeda sama sekali dalam struktur, sehingga pemakaian huruf Cina itu amat sukar bagi nenek-moyang kami. Walaupun demikian orang Jepang belajar menulis huruf Cina, bahkan mencari jalan agar dapat mengungkapkan kata-kata mereka yang diucapkan dengan bunyi huruf Cina melalui huruf fonetik kana. Tulisan kana dari Zaman Heian sekarang amat dihargai karena nilai sasteranya, tetapi tulisan dari zaman itu sebagian besar tidak bernilai dipandang dari segi sastra.

Pada tahun 1853 (Kan-ei Tahun 6) kapal Amerika "Black Ships" dengan komandan Komodor Perry muncul di Teluk Edo dan memaksa dibukanya negara Jepang, yang merupakan negara yang sama sekali tertutup selama 200 tahun. Ketika itu Jepang bukanlah negara yang terbelakang, sebaliknya sudah maju dengan kebudayaan yang sudah berkembang melalui jalan yang amat berbeda sekali dengan kebudayaan negara Barat. Pendidikan sudah merata disemua tingkatan dalam masyarakat dan tingkatan sasteranya dikatakan lebih tinggi daripada sebagian besar negara Eropa ketika itu (Lihat halaman 168 dari "Japan", jilid 20 dari Life History of the Human World Series, diterbitkan bulan Agustus 1969 oleh Time Life Books). Ini memungkinkan negara Jepang mempertahankan sebagian besar tradisi kebudayaan, atau menempatkannya secara lain untuk

mempertahankan dasarnya dalam kebudayaan beragama yang dalam, sambil siap menerima dan memadukannya dengan kebudayaan Barat. Wakon Kansai adalah pendekatan yang ditempuh pada "peradaban dan pencerahan" dari zaman Meiji awal. Dasar kebudayaan unggul semacam ini memacu minat pekerja Jepang pada teknologi baru dari barat dan mereka mampu mempelajarinya cepat. Sektor perdagangan dan perbankan Jepang pada waktu itu sudah maju dan daya penyesuaian dan kelenturan mereka memungkinkan mereka dengan mudah berhubungan dengan kebiasaan barat. Tidak lama lagi Jepang berhasil menyamai dan bahkan melampaui dunia barat.

(2) **Pencampuran "Ilmu pengetahuan Utara" dengan "Ilmu pengetahuan Selatan"**

Lebih setengah abad telah lampau sejak Perang Dunia berakhir (1939 -1945). Pertambahan jumlah penduduk yang cepat pada bangsa-bangsa Selatan dalam masa itu dan keperluan untuk membantunya telah mendorong dunia ke kerjasama antara bangsa Utara-Selatan tanpa menghiraukan pemisahan Timur-Barat.

Dalam tahun 1980-an bertambah jumlah negara Asia Tenggara yang mampu swa-sembada produksi padi. Ini berkat kerjasama antara Utara-Selatan selama 40 tahun. Hal itu dimungkinkan oleh keberhasilan lembaga internasional dan kerjasama bilateral dalam pemberian bantuan teknik dan keuangan di bidang keras dan lunak, seperti misalnya perbaikan dan reklamasi lahan tanaman padi, pengenalan varietas unggul dan cara pemupukan. Masukan ini menyebabkan kenaikan banyak hasil lahan di negara Selatan, namun kenaikan dampak negatif pembangunan pada waktu yang sama juga terlihat. Akibat yang jelek ini termasuk kejatuhan harga beras internasional, arus penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan dan problem mengenai pelaksanaan operasi dan pemeliharaan proyek irigasi besar yang selesai dibangun.

Fasilitas irigasi besar dan modern yang mungkin dibuat berkat datangnya dana dari luar negara direncanakan dan didisain dengan bimbingan teknis dari penyandang dana. Sesudah proyek selesai pembangunannya pelaksanaan seluruh operasi dan pemeliharaan pada bendungan besar, bangunan, instalasi pompa dan jaringan irigasi dan drainase menjadi beban pemerintah daerah serta para petani yang memanfaatkan telah diberitahukan, bahwa mereka sendiri yang harus melakukan operasi dan pemeliharaan saluran tersier.

Pada prakteknya jarang fasilitas ini mendapat operasi dan pemeliharaan yang memadai. Sudah dilaporkan banyak kasus, bahwa fasilitas itu mengalami kerusakan yang parah dalam batas umur rencana dan dibiarkan rusak. Sebagian besar lembaga bantuan menduga, bahwa pengabaian pelaksanaan operasi dan pemeliharaan ini akibat pengurusan yang kurang memadai oleh instansi pemerintah daerah, kekurangan dana operasi dan pemeliharaan, kekurangan pelatihan dalam pengurusan fasilitas, kekurangan kegairahan di pihak petani yang memanfaatkan untuk memelihara

fasilitas dan problem lain. Ini semua problem nyata, tetapi betul juga, bahwa "Tidak ada sesuatupun keluar, lalu apa isinya".

Bagian di bawah ini adalah kutipan dari tajuk rencana yang muncul dalam lampiran khusus pada *Agricultural Civil Engineering* (dahulu majalah dari the Society of Agricultural Civil Engineers, volume 15, terbitan 2/3, September 1943) berjudul "Agricultural Civil Engineering Projects Throughout the Co-prosperity Sphere" (= Proyek Teknik Sipil Bidang Pertanian di seluruh wilayah Kemakmuran Bersama).

.....dalam pemberian pengarahannya pada proyek pembangunan pertanian guna memenuhi kebutuhan di wilayah Kemakmuran Bersama, hal-hal mengenai problem penggunaan air harus dipisahkan dari kebiasaan dan tradisi buat sementara untuk mendapat kesimpulan yang berakar dalam pengamatan secara ilmiah. Kesimpulan ini harus disesuaikan dalam suatu rencana yang mempertimbangkan keadaan setempat dan penduduk. Dengan jalan ini para ahli yang terlatih dimanapun akan mampu menghadapi tantangan dalam tugas tanpa membuat kesalahan besar.Bilamana teknologi Jepang, yang berkembang dalam keadaan yang sangat berbeda dipergunakan di daratan dan negara Selatan yang masih melakukan banyak kebiasaan dan tradisi, keberhasilan usaha banyak sekali diragukan tanpa pengamatan ilmiah yang cermat.(Tanpa perubahan terhadap naskah asli, oleh Kanichi Kachio Profesor pada Fakultas Pertanian pada Universitas Kyoto, diambil dari "Differences in Basic Observations on Agricultural Water Use in Countries of the Coprosperity Sphere = Perbedaan-perbedaan dalam pengamatan mendasar atas Penggunaan Air untuk Pertanian di Negara-negara dalam Wilayah Kemakmuran Bersama").

Laporan Club of Rome yang berjudul "The Green Revolution" atau "Revolusi Hijau" (B, Schneider, Simul Press 1987, hal.167 -169) menyelidiki bagaimana pembangunan di Dunia ketiga harus dinilai dikemudian hari dan bagaimana pendapat kita mengenai itu. Dianjurkannya, bahwa "Sebagian besar negara berkembang sedang mengubah sama sekali strategi pembangunannya (maupun cita-citanya). Daripada mengambil contoh pola pembangunan ekonomi dengan skala besar seperti yang dapat dilihat pada negara yang sudah berkembang dan mengikuti kebijaksanaan untuk mendorong ekonominya sendiri seperti di negara yang sudah berkembang, mereka bahkan memberi tekanan pada pertumbuhan endogen yang timbul dari usaha-usaha swadaya serta keikutsertaan penduduknya sendiri.

Di Asia terdapat banyak Negara berkembang dengan tingkat pengembangan pasar yang tinggi. Iklim dan ciri-ciri alamnya serta susunan sosial dan budayanya setidaknya lebih mendekati keadaan di Jepang daripada di negara Barat. mereka menginginkan apa yang sudah dicapai oleh Jepang dan apa yang timbul dari Jepang. Sektor pertanian di Jepang merupakan salah satu sektor industri besar terakhir di negara itu yang masih mampu mencapai pertumbuhan besar. Teknologi

terapan yang diusahakan hendak dipergunakan dan proses-proses yang pernah dialami mungkin amat sesuai dengan "kriteria pemilihan" negara-negara lain ini.

Pada tahun 1990 terjadi perbedaan lipat 5 antara upah standar di Jepang dan dinegara sedang berkembang yang sudah maju. Bilamana dibanding dengan negara berkembang lainnya perbedaan itu mencapai 15 -20 kali lipat. Perbedaan ini di Jepang menjungkir-balikkan sepenuhnya pengalaman maupun pengetahuan biasa tentang bagian dari perkiraan biaya konstruksi yang dipakai oleh ongkos tenaga dan persiapan bagi perencanaan dan pelaksanaan konstruksi. Ternyata pikiran sehat di negara Utara tidak harus benarkemudian di Selatan. Kombinasi dari irama, adat dan pikiran dalam kehidupan penduduk negara Selatan tertanam jauh dalam basis tradisi dan keagamaan di tiap negara. Sebaliknya basis ini telah terbentuk oleh sejarah dan sifat negaranya. Sehingga kriteria bagi penduduk untuk mempertimbangkan dan menilai hal-hal yang berbeda antara Utara dan Selatan. Ilmu dan pikiran dari Utara harus direkonstruksi untuk dibuat lebih sesuai dengan sifat negara Selatan (lebih berakar) sebelum hal itu dapat dipergunakan.

Walaupun penduduk ikut-serta dalam proses pembangunan, hal ini akan merupakan upaya pertama mereka dalam bekerjasama teknik dan meskipun pekerjaan berlangsung sesuai dengan rencana menurut waktu, dibayangkan timbulnya problim kemudian dan ini harus diatasi. Terutama dalam hal pelaksanaan yang diurus langsung, masih banyak hal yang harus dipertimbangkan. Dapatkah organisasi petani digunakan dengan baik, bagaimanan biaya pekerjaan besar harus dibayarkan kepada organisasi ini, bagaimana menghadapi bencana dan kerugian selama pelaksanaan dan bilamana pelaksanaan di tiap desa dapat selesai dalam satu tahun, berapa banyak pembangunan terus-menerus yang dapat diharapkan ?

Tambahan lagi belum banyak kejadian yang dapat dijadikan contoh dalam hal cara penduduk ikut-serta dalam proyek dan metoda yang dapat diterapkan agar proyek dapat menghasilkan pembangunan terus-menerus. Dengan mengumpulkan dan memeriksa kasus-kasus proyek dengan mengikutsertakan yang dilaksanakan oleh negara berkembang Indonesia dan lainnya dan dengan mengikuti proyek ini sebagai studi kasus untuk acuan diharapkan dapat diberikan sumbangan penting kepada pematapan metoda perencanaan, cara pelaksanaan dan prinsip kerjasama yang akan dapat berguna bagi proyek pembangunan pedesaan kemudian.

2.7. Metoda pembentukan organisasi

Apakah hal yang penting pada proyek pembangunan pedesaan di negara seberang? Bilamana misalnya tujuannya hanya terbatas pada pembuatan jalan hantas, pengadaan tenaga listrik, pembentukan dan reklamasi lahan pertanian, irigasi dan drainase, perbaikan tanah dan memperkenalkan cara bercocok tanam yang modern seperti misalnya varitas padi baru guna meningkatkan produksi, tujuannya jelas sekali. tindakan lain seperti misalnya memperbaiki sistem

keuangan bagi desa pertanian dan menambah kemampuan organisasi koperasi antara petani umumnya dipahami dan dapat diterima. Sebagian besar proyek pembangunan pedesaan di negara dunia ketiga yang dibantu negara maju sudah sesuai dengan kategori yang disebut diatas. Akan tetapi proyek-proyek individual ini tidak lebih daripada proyek individual. Proyek itu bukanlah macam proyek yang dapat digambarkan sebagai "pembangunan desa".

Proyek pembangunan pedesaan mempunyai tujuan memnuhi keinginan sebagian besar desa, agar desa mereka menjadi seperti yang diangan-angankan. Proyek itu mengemukakan tujuan tersebut kepada penduduk desa maupun pemerintah daerah dan berupaya mendekatkan dua pihak itu mencapai tujuan. Sekarang untuk sementara hendak ditentukan macam proyek ini sebagai semacam proyek percobaan. Pada proyek pembangunan pedesaan di negara sebarang ada kesukaran bagi negara penyandang dana untuk menyebar bantuannay secara melebar mengingat personel dan biaya yang dipergunakan. Oleh sebab itu mereka cenderung memusatkan diri pada proyek-proyek eksperimen yang akan dapat menjadi model buat acuan dikemudian hari.

Dalam laporan ini dipakai pendapat, bahwa mencapai kemajuan pada proyek-proyek pembangunan pedesaan seperti tersebut diatas diperlukan ketentuan berikut.

- 1) Metoda survey yang dapat menemukan "Apakah tujuan sebenarnya yang diinginkan desa" ?
- 2) Organisasi-organisasi penduduk desa yang dapat dijadikan pendukung
- 3) Adanya hubungan antara pemerintah daerah dan organisasi penduduk desa.

Sekarang hendak dicoba membuat teori umum mengenai hal-hal penting ini, bertolak dari pengalaman yang dikumpulkan di Bangladesh.

(1) Metoda survey untuk proyek pembangunan pedesaan di seberang

Jalannya untuk menemukan jawaban atas pertanyaan "Apakah tujuan sebenarnya yang diinginkan desa ?" melalui "key question" (= pertanyaan pokok). Pertanyaan pokok adalah suatu kalimat yang pertama kali dipergunakan dalam penyelidikan mengenai sistem pertanian. Pertanyaan ini mengacu kepada inti persoalan yang dikupas mengenai sistem pertanian. Sebuah survey guna menemukan pertanyaan pokok dalam pembangunan desa harus paling sedikit menghasilkan keterangan mengenai desa yang dipilih sebagai berikut.

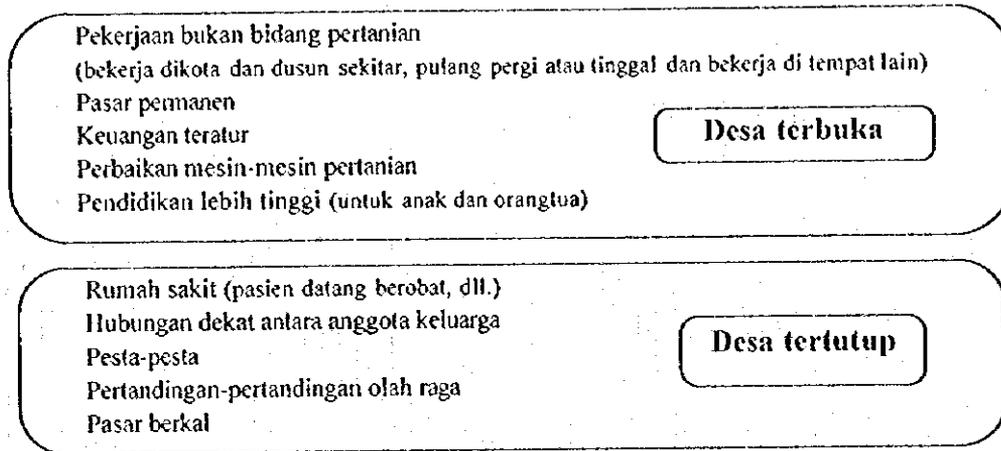
- Perincian penduduk menurut kelamin dan umur

- Tingkat pendidikan
- Perincian pekerjaan (pekerjaan yang dimiliki kepala keluarga dan semua karyawan)
- Kelakuan (penggunaan waktu)
- Pertukaran antara kota dan desa
- Pendidikan Sekolah Menengah dan atas, kegiatan waktu luang, pesta, pasar, pekerjaan non pertanian, pekerjaan di luar rumah, pengiriman uang
- Biaya hidup keluarga petani
- Organisasi sosial di desa pertanian
- Organisasi sosial tradisional, tugas kewajiban bersama, kepemimpinan, koperasi pertanian
- Keadaan kebijaksanaan pembangunan pedesaan
- Kegiatan pemerintah daerah, industri khusus, perseroan umum dan badan hukum, koperasi pertanian dan I.S.M
- Hubungan antara pemerintah daerah dan desa
- Keadaan keuangan pedesaan
- Produksi pertanian dan teknologi penanaman

Hal-hal penting yang harus disurvei tersebut diatas dipilih berdasarkan pikiran: "Desa pertanian ialah ruangan bagi pertanian, akan tetapi hal itu bukan berarti, bahwa disana siapapun hidup dari pertanian. Tidak semua orang bersangkutan dengan pertanian, tetapi setiap orang setidaknya memiliki sebidang tanah dengan sebuah rumah diatasnya yang didiami". Memang sebenarnya sukar untuk menemukan sebuah desa di Asia, dimana lebih dari separo jumlah pendapatan di desa dari pertanian. Desa-desa pertanian ini merupakan kelompok penduduk yang memiliki amat bermacam-macam pekerjaan.

Diantara hal-hal penting yang harus disurvei tersebut diatas "Pertukaran antara kota dan desa" yang istimewa menarik. Dalam batas-batas penyelidikan didua desa di Bangladesh "pertukaran" ini isinya seperti yang tercantum dalam tabel di bawah. Desa-desa yang lebih terbuka dengan pertukaran yang berimbang cenderung sesuai dengan yang tercantum dalam tabel yang diatas, sebaliknya hal dalam tabel yang dibawah lebih banyak ditemukan pada desa-desa yang kurang terbuka dengan pertukaran yang kurang berimbang.

Pertukaran antara desa-desa dan dunia luar



Hubungan antara para penduduk desa dan pemerintah daerah (atau organisasi politik setempat) tidak erat, akan tetapi hubungan-hubungan penting terdapat seperti tercantum dibawah.

- Pemerintah daerah (pertolongan bencana, layanan umu, bukti jaminan keuangan, pendamaian pada perselisihan soal lahan)
- Pendidikan dasar (lewat anak-anak atau dalam pengasuhan anak-anak)
- Koperasi pertanian
- Ketertiban dan keamanan
- Kegiatan partai politik (pemilihan lokal)

Bangladesh terkenal mempunyai penduduk lebih dari 80% yang tinggal di desa-desa, akan tetapi hanya 60% dan jumlah keluarga hidup dari pertanian. Walaupun yang 60% dapat disebut keluarga pertanian, sekitar 30% tidak memiliki lahan dan hidup sebagai buruh tani. Memang bilamana seorang petani tanpa lahan digolongkan sebagai memiliki kurang dari setengah acre (= 20 are) lahan, perbandingan yang sesuai dengan anggapan ini naik menjadi 60%.Lau bagaimanakah petani kecil dan buruh-tani dan kehidupannya? Menurut hasil penyelidikan mengenai perincian pekerjaan diantara keluarga-keluarga dari desa pertanian di distrik {Tangile}, 13% merupakan penenun, 3% pengolah tembakau {piri}, 9% pedagang kecil, 26% pekerja harian, termasuk buruh tani musiman. Lebih dari separoh memiliki berbagai pekerjaan tidak tetap ini di daerah paling dekat. Sebuah survey suatu desa pertanian di distrik {Komeira} memeplihatkan, bahwa dalam sembilan dari sepuluh keluarga paling sedikit seorang anggotanya menjadi petani sebagian waktu bekerja di semacam pekerjaan bukan pertanian untuk mendapat tambahan uang.

Dalam keadaan yang kompleks semacamitu sukar sekali untuk menentukan apakah pertanyaan yang pokok. Berbagai cara dalam menemukan pertanyaan pokok barangkali mengarah ke proyek

yang berbeda. Misalnya bagi suatu desa tunggal satu diantara pendekatan berikut dapat dipergunakan.

- 1) Perencanaan proyek dapat mementingkan pembangunan pedesaan melalui pembangunan prasarana misalnya perluasan lahan pertanian, fasilitas irigasi dan pematangan lahan.
- 2) Sebagai alternatif penyempurnaan prasarana yang sederhana dan jelas dapat dilakukan, misalnya pengadaan tenaga listrik dan pembuatan jalan penghubung ke kota-kota.
- 3) Persoalan distribusi yang menjadi penghambat masukan yang perlu bagi penyelenggaraan pertanian modern dapat juga diberi perhatian utama.
- 4) Penciptaan kesempatan menggunakan keuangan umum mungkin dapat memenuhi harapan banyak penduduk.
- 5) Proyek yang mementingkan layanan administrasi yang disempurnakan barangkali diinginkan sekali. Ini dapat mencakup penyempurnaan fasilitas pendidikan, pemeliharaan kesehatan manusia dan ternak, perbaikan fisik pasar berkala dan lain sebagainya.
- 6) Pemeliharaan ketertiban umum dan pendemokrasian kehidupan politik di desa dapat dijadikan persoalan yang terpenting.

Dahulu pertanyaan pokok yang diperoleh dalam metoda survey yang lazim bagi mereka yang bertugas di bidang teknik sipil dalam pertanian cenderung mengarah ke proyek dibidang pekerjaan umum dan peningkatan produktifitas pertanian. Faktor bersamaan terbesar antara pertanyaan pokok bagi pembangunan desa terletak pada layanan administrasi dan perbaikan cara hidup, daripada pada prasarana dan produktifitas pertanian. Cara untuk mendapatkan apakah kebutuhan sesungguhnya terletak pada metoda survey. Suatu metoda survey yang baku untuk diterapkan pada pembangunan desa disebelang sudah mendesak diperlukan.

(2) Lembaga utama pelaksana dan para penerima pembangunan pedesaan

Bagaimanakah para penerima pembangunan desa harus dipandang? Dalam hal ini wajar saja bila ODA (Overseas Development Administration = Kantor Pembangunan Daerah Seberang) membuat pendekatan pada pembangunan desa berbeda dengan yang dibuat LSM.

Pendekatan LSM memilih kelompok-kelompok dalam desa (biasanya dari lapisan yang lemah ekonomi) dan mereka disatukan dalam perkumpulan-perkumpulan LSM dengan sadar menghindari pemerintah daerah serta lembaganya, demikian pula dengan kepemimpinan tradisional dari desa, dalam memberi bantuan pada pembentukan perkumpulan. Pendirian ini didasarkan atas kesadaran akan adanya soal-soal dalam masyarakat desa pertanian, yang dapat

dibagi menjadi si-kaya dan si-miskin dalam hubungan tuan dan pelayan, atau disebut pula hubungan patron-client (yang melindungi - yang dilindungi). Para pejabat pada pemerintah daerah adalah yang melindungi bersama para pemimpin tradisional, dan mereka itu merasa berlawanan dengan yang tertekan. Di negara seperti Bangladesh, yang mempunyai cita-cita sosialis perasaan semacam ini terutama kuat. Apakah analisa ini tepat atau tidak, perkumpulan individual surut apabila bantuan yang mereka peroleh dari LSM berkurang, kecuali apabila mereka telah tergabung menjadi semacam perserikatan yang lebih besar. Metoda ini adalah yang terbaik yang mungkin guna membangkitkan kegairahan dan kesediaan para belia yang mau membaktikan diri pada pekerjaan LSM, namun dengan berbagai jalan pendekatan ini tidak sesuai sebagai model untuk pembangunan desa.

Keberhasilan gerakan di negara Korea Selatan {Semauru} (gerakan desa baru) dihubungkan oleh sementara orang dengan pemilihan {Mauru} sebagai satuan pembangunan (pendapat Mr. Toshikero Yogo, Pusat Pembangunan Regional PBB). Mauru ialah satuan dusun yang amat mendekati desa alamiah. Mereka mempunyai kepemimpinan tradisional dan penduduk Mauru saling berkenalan dan mempunyai hubungan pribadi dengan pemimpin-pemimpinnya. Kegiatan Semauru dimulai ketika sebuah kantong berisi semen penuh dibagikan kepada tiap keluarga dalam satuan dusun. Mengingat sebuah kantong tidak mencukupi bagi tiap keluarga untuk melakukan sesuatu yang penting, para penduduk berkumpul untuk membicarakan keadaan. Dengan hasil semen dipergunakan untuk meratakan sekeliling sumur tempat para wanita mencuci pakaian. Ini mengilhami bekerjasama dan mereka menemukan rangkaian pikiran semacam itu yang menyebar menjadi gerakan nasional dalam pembangunan desa.

Gerakan Semauru memberi pelajaran empat hal :

- 1) Satuan pembangunan hendaknya satuan kecil masyarakat, yang dapat mengadakan debat dan mencapai kesimpulan dengan mudah.
- 2) Kepemimpinan satuan masyarakat itu harus disegani
- 3) Pembangunan desa hendaknya diawali dengan tindakan yang memperbaiki kehidupan sebagian besar penduduk desa. Jangan diartikan sekedar meningkatkan produksi pertanian.
- 4) Jurusan yang diambil oleh pemerintah daerah harus ditempuh dan dijadikan pedoman

Dengan pendekatan serupa penyelidikan di bidang pertanian atau dengan perkataan lain survey untuk menemukan pertanyaan pokok menyamakan sejumlah pertanyaan pokok. Bagaimanakah penerapannya ini ? Bilamana orang asing langsung pergi ke suatu desa untuk memajukan pertanyaan utama, tidak ada bedanya dengan pekerjaan LSM, meskipun anggaran disediakan oleh Kantor Pembangunan Daerah Seberang. Bilamana melihat keadaan Bangladesh

misalnya ada dua kekuatan yang mampu mencapai jauh melebihi kegiatan LSM ke dalam desa-desa pertanian ataupun badan layanan lokal. Salah satu adalah kelompok politik (sebuah partai politik) dan yang lainnya sektor swasta selaku penjaja keliling, pedagang perantara dan pedagang pasar.

Di negara Banglaesh pembangunan pertanian yang resmi oleh pemerintah di masa lampau tidak membawa hasil dan bertolak dari kegagalan itu harapan besar di nanti dari sektor swasta. Selaku instansi Kantor Pembangunan Daerah Seberang tidak dapat mengambil sektor swasta ataupun kelompok politik sebagai pendamping dalam pembangunan desa.

Jelas bahwa pembangunan desa merupakan tugas pemerintah. Terutama karena sifat tugasnya pembangunan harus diselenggarakan sebagai layanan berkelanjutan dan pemerintah daerah tanpa pengaruh yang berlebihan dari dunia politik. Oleh karena itu pada pelaksanaan proyek pembangunan pedesaan di seberang harus dipakai sistem pemerintahan daerah sebagai pendamping tanpa menghiraukan berhasil atau tidak dan tanpa memperhatikan tingkat kemampuan pemerintah.

Hal selanjutnya ialah tingkat kelompok masyarakat yang mana yang harus diperhatikan sebagai penerima spesifik dari pembangunan desa. Tidak boleh berbuat seperti yang dilakukan LSM dan membuat organisasi petani semanya. Tinggallah mempergunakan organisasi dan kepemimpinan yang sudah ada sebaik mungkin dan memeliharanya dan inilah syarat minimum bagi pelaksanaan.

(3) Hubungan antara badan-badan pelaksana dan para penerima dalam pembangunan desa (situasi yang ada di Bangladesh)

Kalau begitu apakah problem-problemnya dengan badan pelaksana dan penerima dalam pembangunan desa pada kasus di Bangladesh ? Bilamana ada problem, bagaimanakah penyelesaiannya ? Marilah dipelajari jawaban pada kasus specific dari Bangladesh.

Salah satu pertanyaan utama yang dijumpai di Bangladesh (pertanyaan utama yang terpenting) ialah perkumpulan yang merupakan pemerintahan daerah tingkat rakyat jelata dan organisasi otonom di desa-desa terputus satu sama lain secara sistematis, psikologis dan sering secara fisik (pada kasus tidak ada jalan atau hubungan secara lain). bAiklah dilihat dengan lebih terperinci apa yang dimaksud.

a) Sistem pemerintahan daerah Bangladesh

Dasar pada sistem pemerintahan di Bangladesh di bentuk dalam masa penjajahan Inggris ketika masih menjadi satu sebagai negara India. Tetapi sesudah itu sistemnya telah

diubah semuanya oleh pemerintah pusat pada berbagai kesempatan. Pada waktu ini sebagian besar seperti ditunjukkan dalam Tabel 1-1.

Tabel 1-1. Perubahan Sistem Pemerintahan Daerah di Bangladesh

Sebelum 1982		Sesudah 1983 (perubahan penduduk rata-rata)	
Pemerintahan lokal		Pemerintahan lokal	
Divisi	4	Divisi	4
Distrik	19	Distrik	21
Sub-divisi	55	Sub-divisi	64 l.k. 1.640.000
Thana	435		
Pemerintahan otonom		Pemerintahan otonom	
Perkumpulan	4.401	Upazila	460 l.k. 228.000
		Perkumpulan	4.401 l.k. 24.000

Keterangan) Angka menunjukkan jumlah

Sampai tahun 1982 distrik merupakan inti pemerintahan daerah, gubernur distrik diutus oleh pemerintah pusat untuk menduduki jabatan ini. Ada pula pejabat keliling dalam sub divisi yang merupakan pegawai diutus dari pusat. Pejabat keliling itu mengawasi pemerintahan desa pertanian melalui ketua perkumpulan. Perkumpulan itu organisasi pemerintahan otonom, yang pembentukannya belum lama, dalam tahun 1985. Susunannya seorang ketua dengan sembilan orang anggota, yang dipilih lewat pemilihan biasa. Union Council (=Dewan Union) yang terdiri dari para ketua perkumpulan mula-mula merupakan pertemuan para wakil desa, akan tetapi sekali itu sudah berkembang sampai anggotanya sebanyak 24.000 orang. Berbeda dengan sekedar pertemuan wakil desa dewan itu dipandang sebagai pengelompokan orang-orang berpengaruh dan politik dari wilayah-wilayah. Hanya Dewan Union yang mempunyai seorang sekretaris sebab menurut tradisi tidak memiliki bagian tata usaha.

Thana ialah distrik-distrik yang dibawah kewenangan kantor-kantor polisi. Chokidar adalah organisasi keamanan desa di tingkat perserikatan, diluar jalur pemerintahan daerah dan masuk kekuasaan Thana. Adapula kantor pajak lahan di tingkat sub divisi yang menghitung dan memungut pajak atas lahan di unit-unit Mauza.

Sejak tahun 1983 Pemerintahan Ershad mengubah nama daerah-daerah geografis yang semula dinamakan Thana, satuan lokal dari demokrasi rakyat biasa menjadi Upazila. Upazila dibuat menjadi divisi politik dan pemerintahan lokal yang paling penting dan ketuanya dipilih lewat pemilihan biasa. Dewan Upazila dibentuk dengan anggota para ketua perserikatan semula. Pada waktu yang sama fungsi pemerintah dan hukum dari sub divisi dan fungsi kepolisian dari Thana dimasukkan dalam dewan Upzila, ditempatkan di bawah kewenangan ketua Upzila dalam gerakan pembaruan yang berani.

Pada akhir 1990 ketika pemerintah Khaled Zia dimulai bentuk pemerintahan daerah diubah lagi. Pada waktu ini kewenangan ketua Upazila dikurangi dan fungsi Pejabat Pembangunan Upazila (Upazila Development Offices = UDO, ayng pegawai pemerintah) diberlakukan lagi.

b) Organisasi desa di Bangladesh

Satuan organisasi sosial di desa dari yang terkecil adalah sebagai berikut :

Khana = keluarga

Bari = Kelompok keluarga yang diperluas, didalamnya keluarga orangtua maupun keluarga anaknya membangun sebuah gedung bersama-sama dalam halaman yang dikelilingi dinding

Para = kelompok tetangga sekeluarg, umumnya terdiri dari 10 keluarga

Gram = Dusun terdiri dari 100 – 300 buah keluarga dengan standar jumlah penduduk 1000 orang

Mauza= Dusun yang merupakan satuan dalam perpajakan, biasanya sama dengan gram

Sebuah Perserikatan dibentuk dari 10-30 buah gram. Wakil dari sebuah Para itu pemimpin tradisional tidak resmi yang disebut Matabore dan sejumlah Matabore bersama-sama dalam sebuah Gram dapat menjadi satu organisasi yang sah bernama Pichar. Pichar itu diperbolehkan mempunyai kewenangan sebagai hakim atas kelakuan sebagian penduduk desa atas dasar tauladan akhlak. Kecuali lembaga-lembaga ini ada perkumpulan koperasi pertanian, yang diwakili oleh ketua dan manager perkumpulan, tetapi ini merupakan kategori pemimpin yang berbeda dari Matabore. Para Imam yang bertanggung jawab atas masjid sebenarnya semacam pemimpin juga, tetapi mereka tidak memiliki kewenangan sekutu yang sebenarnya.

c) Fungsi layanan dalam pembangunan pedesaan

Sudah diterangkan di atas, fungsi akhir para departemen berwenang yang terkait dalam pertanian dan pembangunan pertanian sebagian besar berbaris di Upazila, tetapi para perawat kesehatan masyarakat (termasuk perawat laki-laki), para perawat kesehatan masyarakat keluarga berencana, para dokter hewan dan penyuluh pembaruan pertanian sudah memberikan jasanya sampai Perserikatan. Badan Pembangunan Pedesaan

Bangladesh (BRDB = Bangladesh Rural Development Board) menugaskan 2 orang petugasnya kepada tiap Upazila, namun di Perserikatan tidak. Organisasi pertanian yang terkenal sebagai model {Komira} dilahirkan di Komira dan sekarang sudah berkembang di seluruh negara. Puluhan ribu Mauza di seluruh negara diorganisasikan menjadi asosiasi pertanian (XSS), tetapi sebenarnya sebagian besar hanya kelompok untuk perantara keuangan dalam nama. Berbeda dengan ini ada pula Perusahaan Pembangunan Pertanian Bangladesh (BDAC = Bangladesh Agricultural Development Corporation) yang biasa bekerjasama dengan organisasi koperasi pertanian dalam membuat sumuran dalam. Perusahaan ini mempunyai cabang pada tingkat Thana dan Upazila, akan tetapi sekarang fungsinya sebagian besar menurun karena kebijaksanaan pengswastaan.

d) Pemisahan antara pemerintah daerah dan lembaga otonom desa

Bangladesh menyandarkan diri pada bantuan luar negara sebanyak 40% dari anggaran nasional dan lebih dari 90% dari anggaran pembangunan. Hanya sebagian amat kecil dari anggaran disediakan untuk pembangunan pedesaan dan seperti sudah diterangkan di atas dana disalurkan lewat berbagai jalur agar merata ke seluruh negara, sehingga pengaruhnya praktis tidak dapat dilihat. Memang sebuah proyek pembangunan desa yang dapat dilihat ialah yang bernama proyek "Road for works", yang memberikan kepada janda dan orang miskin lain pembagian amat sedikit tepung terigu untuk pekerjaan sederhana pada perbaikan jalan. Proyek lain ialah pembagian amat sedikit kondom oleh perawat kesehatan masyarakat keluarga berencana. Ada harapan kecil usaha yang tidak jelas semacam itu menimbulkan perhatian dan kegairahan penduduk desa. Antara ketidakefisienan pemerintahan dan kekurangan perhatian serta keputusan penduduk desa adalah jujur untuk menggambarkan, bahwa keadaan pembangunan desa itu lemah seperti memutar roda rusak yang mungkin dalam bahaya akan berhenti sama sekali. Hasilnya proyek yang dapat dilihat ialah pekerjaan konstruksi departemen masing-masing secara terpisah. Dalam ini termasuk pembuatan saluran irigasi, pengeboran sumuran, pencegahan banjir, pembuatan jalan pertanian dan pengadaan listrik untuk desa pertanian dan pengadaan listrik dan itu semua dapat dilihat sebagai sumbangan yang dapat diberikan pada pembangunan desa.

Sebagian besar instansi yang berkewajiban dalam pembangunan pedesaan, dengan perkataan lain pemerintah daerah, departemen, perusahaan swasta dan perusahaan negara dan organisasi koperasi pertanian ditempatkan di Upazila, yang sesungguhnya menjadi organisasi yang paling ujung dari semua lembaga itu. Walaupun sistem kepemimpinannya masih berlanjut sampai dengan perserikatan, tetapi ini hanya sedikit kemampuannya dalam pengurusan dan pada sebagian besar kasus tidak ada fungsi di

tingkat perserikatan. Kecuali itu lembaga-lembaga tersebut diatas mempunyai mekanisme untuk mengadakan konsultasi di tingkat Upazila, tetapi di tingkat perserikatan lembaga itu harus beroperasi terpisah.

Jikalau organisasi otonom desa itu aktif, Matabores yang mempunyai kemampuan dan kewenangan yang terbesar tidak harus melibatkan diri problim pembangunan yang sebenarnya. Sebaliknya para pemimpin baru, yang ingin secara tidak jujur menggunakan hak-hak akan pembangunan baru dipandang sebagai sedikit lebih dari penipu. Para pemimpin desa mungkin tidak dapat dilibatkan sebagai utusan dalam pengurusan Perserikatan, yang merupakan kekurangan pada sistem. Seperti telah diterangkan di atas terdapat kekurangan ketersambungan sistematis, psikologis dan fisik antara para perserikatan dengan desa.

(4) Harapan adanya hubungan antara badan pelaksana dengan para penerima dalam pembangunan desa

Dibawah ini tiga buah masalah yang disarankan oleh sebuah proyek kecil penelitian gabungan (Proyek JICA penelitian koperasi), yang berjudul "Percobaan dalam Pembangunan Pedesaan di Bangladesh".

- 1) Menggali kecakapan-kecakapan terpendam dan mengembangkannya
- 2) Mendorong hubungan timbal-balik antara kota dan desa dan mengembangkannya menjadi tiang pembangunan desa
- 3) Membuat model hubungan antara sistem layanan pemerintah daerah dan organisasi otonom desa

Macam pembentukan organisasi yang diuraikan dibawah ini sekarang dimulai dalam usaha mencoba tiga gagasan ini.

a) Di tingkat Upazila

Panitia penasihat akan dibentuk bagi Pejabat-pejabat Pembangunan Upazila (UDO = Upazila Development Offices) dan Pejabat-pejabat Pembangunan Pedesaan (RDO = Rural Development Offices) dalam Bangladesh Rural Development Board (BRDB). Panitia ini hendak memberi pengarahan yang mencakup banyak hal dan persetujuan bagi pekerjaan pembangunan desa. Ahli dalam beberapa hal akan diminta dalam panitia pula.

b) Di tingkat Perserikatan

Beberapa orang staf yang dikirim oleh BRDB akan dijadikan perencana proyek ("project mastermind") dan diberi kewenangan untuk itu. Mereka hendak diberi kedudukan sekretaris panitia Perserikatan untuk membantu pekerjaan orang-orang yang terlibat dalam proyek (anggota Perserikatan Council untuk pembangunan, pejabat departemen di tingkat perserikatan, para wakil lembaga terkait, para wakil LSM yang bekerja di Perserikatan dan para wakil desa percobaan). Kelompok orang-orang ini akan menjadi kelompok musyawarah dalam pembahasan mengenai semua pertanyaan pokok untuk mencapai konsensus dan menyetujui pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang bersumber pada tiap pertanyaan pokok.

c) Di tingkat Gram

Panitia Pembangunan Desa akan dibentuk dengan Matabores sebagai wakilnya desa-desa. Panitia ini akan mengadakan pembahasan mengenai semua pertanyaan pokok dan mengesahkan kelompok-kelompok yang akan menjadi penerima proyek percobaan yang dilaksanakan. Sudah tentu bagi kelompok penerima akan amat penting jika selalu mempunyai hubungan sebelumnya, agar dapat dicapai saling pengertian.

Bilamana persiapan ini sudah selesai, semua proyek yang hendak dilaksanakan akan diajukan ke atas oleh Panitia Pembangunan Desa agar mendapat persetujuan oleh Panitia Pembangunan Perserikatan akan menjadi badan yang melaksanakan proyek. Sekecil apapun proyek ini cara yang tepat lewat proses ini adalah syarat penting bagi pelaksanaan. Proses inilah model yang membangun organisasi yang diperlukan untuk proyek pembangunan pedesaan, agar nanti bilamana percobaan sudah dilepaskan pada tingkat tertentu, berbagai badan yang terkait sudah dapat melanjutkan.

Bagian ini tidak diteruskan kecuali mengambil beberapa proyek kecil yang diteliti di lapangan di Bangladesh sebagai contoh. Tidak diteruskan, oleh karena di tiap negara ciri pemerintahan daerah dan organisasi ke masyarakatan di desa akan berbeda, sehingga di luar kemampuan untuk mengajukan sebuah teori universal buat "Organisasi Pembangunan Pedesaan di Asia". Bila dibanding dengan negara-negara ASEAN Bangladesh berada di tingkat yang jauh dibawah dalam pembangunan dan keadaan politik negara itu mudah berubah, oleh sebab itu contohnya tidak dapat ditarik makin jauh dengan ciri yang sama. Walaupun demikian satu hal penting yang dapat diperlihatkan ialah, bahwa desa-desa senantiasa mempunyai sesuatu bentuk organisasi otonom yang kuat dan di tiap negara ada penduduk yang suka membantu pembangunan desa dan kelompok-kelompok serta lembaga pemerintahan yang dibentuk oleh

penduduk itu. Mereka yang mengatakan tidak ada kelompok dan orang semacam itu tidak pernah melihat dari dekat. Hal yang dapat dilakukan oleh orang dari luar negara bila turut serta pada proyek pembangunan pedesaan ialah berusaha sebaik mungkin untuk menemukan organisasi yang khas dari desa dan mencari orang-orang kelompok-kelompok yang bergairah serta mempunyai keterkaitan. Orang dari luar negara akan menghilangkan tiap rintangan yang menghalangi pekerjaan orang-orang dan kelompok-kelompok dan menimbulkan lingkungan yang tepat, agar mereka dapat bekerja efektif.

Untuk mencapai tujuan ini hal berikut dapat dilakukan :

- a) Lakukan survey tentang desa pertanian tingkat yang tepat
- b) Tentukan pertanyaan-pertanyaan pokok atas dasar survey-survey
- c) Cari organisasi-organisasi desa pertanian yang hendak menjadi penerima pembangunan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan pokok tersebut di atas (mungkin organisasi-organisasi ini tradisional atau baru, organisasi modern yang sesuai dengan pembangunan ekonomi)
- d) Hubungkan organisasi-organisasi yang ditemukan dengan lembaga-lembaga pemerintahan di daerah
- e) Sediakan bantuan yang kurang penting bagi proyek-proyek pembangunan desa lain yang khas bagi daerah

Pada pembangunan desa para penduduk desa itu sendiri yang sebagai ahlinya, sedang pejabat yang bertugas di pemerintah daerah sebagai setengah ahli atau setengah orang awam. Orang-orang dari luar negara yang dilibatkan dalam pemberian bantuan adalah yang benar-benar orang awam. Pembalikan penglihatan ini amat penting. Maksudnya orang-orang awam itu lebih baik menciptakan keadaan-keadaan yang memungkinkan ahli-ahlinya melakukan pekerjaan mereka lebih baik.

2.8. *Peninjauan kembali kebiasaan bertani tradisional dan penciptaan cara teknis baru dari peninjauan itu*

Penanaman bermacam-macam dan pencegahan penyakit yang bermacam-macam akhir-akhir ini menarik banyak sekali perhatian sebagai teknik pertanian baru, yang bertujuan mencapai kesesuaian dengan lingkungan. Ini adalah cara dalam teknik yang mempergunakan ekologi lahan yang dibudidayakan. Itulah lawan yang tepat bagi pertanian modern, yang mengandalkan penanaman secara besar-besaran dengan satu macam tanaman dan menggunakan bahan kimia banyak. Ini bukanlah pemikiran baru. Itu cara-cara teknik yang sudah disatukan berdasarkan pengalaman dan pemikiran selama pelaksanaan pertanian tradisional. Sekarang itu dapat dilihat

lagi dipandang dari sudut cara-cara menuntut ilmu modern dalam usaha mencapai kesesuaian dengan lingkungan dalam cara teknik yang bersegi banyak.

Penelitian yang dilakukan di negara Israel pada pembangunan gurun pasir sudah dipelajari juga secara luas. Penelitian tentang cara cocok-tanam Nabateau kuno yang berusaha mengetahui bagaimana cara orang Nabateau kuno berhasil mencapai hasil produksi tinggi untuk mempertahankan kebudayaan di tengah gurun Sinai tanpa irigasi, menemukan metoda pemanfaatan sumber air dan lahan yang dikenal sebagai "Rain Harvesting". Hanya memperoleh air hujan sangat sedikit metoda ini dilaksanakan dengan keterbatasan, menangkap embun dalam tanah lewat pengelolaan tanaman yang mendalam dan memperbaiki tanah. Sekarang pendekatan ini dipraktikkan berdasarkan percobaan untuk penyempurnaannya hingga menjadi metoda penghijauan praktis pada daerah tepi padang pasir di Israel, juga di Afrika Utara.

Disini pendekatannya melihat metoda cocok tanam tradisional dari suatu daerah dan mencari metoda mendapat hasil pertanian yang seluas betul-betul dengan keadaan khas lingkungan di daerah.

Pendekatan ini pantas distudi dengan teliti dan dipertimbangkan dalam memperoleh bantuan yang diberikan kepada negara berkembang sepanjang hal itu cenderung hanya tidak lebih dari memaksakan metoda cocok tanam yang seragam.

3. Tugas pelaksanaan proyek pembangunan pertanian dan pedesaan

Proyek pembangunan pertanian dan pedesaan mempunyai 2 tujuan pokok. Yang pertama ialah menyediakan kebutuhan pokok penduduk pedesaan (terutama yang termiskin) dan memperbaiki kualitas hidup dengan membantu penduduk keluar dari kemiskinan, menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan produksi pertanian dan mengadakan perbaikan misalnya di bidang obat-obatan, kesehatan masyarakat, pendidikan dan perumahan. Yang kedua adalah mendorong penduduk pedesaan turut serta secara tanpa diminta (spontan) dan bebas pada proses pembangunan untuk mencapai perkembangan di tingkat desa dan dusun, yang merata menurut skala nasional dan daerah. Pendekatan ini menimbulkan kerangka yang teratur, yang dapat menyatukan usaha-usaha pemerintah maupun tenaga penduduk secara bermanfaat. Tugas-tugas pada pelaksanaan pembangunan pertanian dan pedesaan yang sudah disebut sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut.

Mengenai tugas politis dalam pembangunan pertanian dan pedesaan, pembangunan itu memerlukan proyek bermacam-macam untuk membangun dasar-dasar pertanian, mengadakan produksi, bahan dan jasa serta jasa sosial maupun konsumen. Proyek-proyek semacam itu melibatkan banyak instansi pemerintah. Tugas mengurus pembangunan pedesaan itu mengkoordinasikan upaya-upaya instansi ini, agar mereka itu bekerja bersama sehingga mencapai hasil melebihi jumlah hasil masing-masing sambil melakukan fungsi masing-masing. Bilamana melihat pendekatan-pendekatan yang diambil untuk tugas ini di berbagai negara, satu pendekatan ialah membentuk sebuah lembaga yang bebas untuk mengambil dan melaksanakan metoda pembangunan daerah pedesaan yang khusus yang menggabungkan banyak fungsi bermacam-macam. Lembaga lain menyusun sebuah mekanisme untuk melakukan koordinasi antara instansi.

Peranan tradisional pemerintah daerah pada umumnya menjaga keamanan dan stabilitas daerahnya sambil menjalankan kebijaksanaan pemerintah pusat dengan taat. Dengan diadakannya kebijaksanaan pembangunan pedesaan peranan pemerintah daerah bertambah banyak. Misalnya salah satu segi peranan pemerintah daerah ialah mewujudkan kebutuhan dan keinginan di tingkat desa dengan cermat pada pelaksanaan pembangunan pedesaan di tingkat daerah maupun desa. Terutama bilamana proyek pembangunan pedesaan di lapangan diharuskan berhasil, proyek itu memerlukan pekerjaan yang terperinci dan kena pada tingkat rakyat biasa.

Banyak pelajaran dan tugas dapat dimengerti dari proses proyek pembangunan pertanian dan pedesaan yang dapat dijadikan contoh.

Hal penting yang pertama ialah proyek pembangunan prasarana pedesaan, yang sudah teratur sebagian besar, dipusatkan pada pembuatan prasarana serta pembuatan fasilitas di lingkungan hidup. Sebagai pembangunan desa yang diusahakan pemerintah dengan pembiayaan uang rakyat

pembangunan itu pembangunan pedesaan yang didasarkan pada ketergantungan pada pihak lain. Pikiran tentang keadaan ini membawa ke timbulnya gerakan swadaya oleh penduduk setempat sendiri. Dorongan serta penghidupan kembali desa-desa pertanian dapat dicapai dengan penggabungan dua pendekatan ini. Hal penting yang kedua ialah lingkungan hidup menjadi pusat produksi. Hal ini disebabkan oleh penilaian dampak lingkungan tidak selalu dijalankan dengan tepat dan oleh kekaburan pemilikan sumber daya, yang dinilai tanpa membeda-bedakan. Terutama pembagian hasil pembangunan tidak merata, dengan manfaat karena eksploitasi lingkungan dengan mengatasnamakan kemajuan seringkali dipusatkan ditangan sebagian kecil penduduk. Keadaan ini menimbulkan pertentangan yang rumit antara para yang pemanfaat mengenai kepemilikan hasil-hasil pembangunan.

Pembangunan dalam batas-batas yang masih cocok dengan pembaruan lingkungan menjadi prasyarat bagi pembangunan produksi pertanian yang berkelanjutan. Pada waktu peninjauan jangka pendek bentuk pembangunan selalu memaksakan beban terhadap lingkungan, akan tetapi bilamana produksi pertanian didasarkan pada pengrusakan lingkungan, produksi itu selalu menimbulkan problem besar pada jangka panjang. Oleh karena itu metoda-metoda maupun prosedur-prosedur analisa lingkungan harus selesai dilakukan lebih dahulu.

Mengenai tugas studi pembangunan pertanian dan pedesaan ada beberapa persoalan sebagai berikut. Banyak cara mengenai bagaimana menciptakan kesempatan kerja di sektor pertanian dan non-pertanian, keadaan keseimbangan tenaga pertanian dalam dan sekitar desa, kegiatan kelompok lewat koperasi pertanian, keadaan pembiayaan, problem mengenai sistem dan efek penyuluhan pertanian, kesempatan pendidikan dan latihan, peran serta petani pada kegiatan perdagangan dan lain sebagainya. Kecuali soal teknis di bidang pertanian, ekonomi pertanian dan manajemen, soal kemasyarakatan dalam hubungan manusia, kepemimpinan, struktur masyarakat dan kegelisahan dalam masyarakat merupakan hal yang sangat penting yang harus dipelajari.